



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

Cirebon Masa Depan



Sambut Cirebon Masa Depan

Setelah menemani pembaca budiman dan menjadi co-rong informasi DPRD Kabupaten Cirebon 2019-2024, edisi Agustus ini merupakan pamungkas periode ini.

Pada September nanti, anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 akan mengakhiri masa tugasnya. Dan akan dilanjutkan legislator terpilih hasil pemilihan legislatif tahun 2024.

Beriringan itu, usia majalah Cirebon Katon juga akan genap lima tahun sejak pertama kali diorbitkan dari sebelumnya bernama Berita Informasi Wakil Rakyat (Biwara).

Sebagai rasa syukur sekaligus kenangan atas kinerja terbaik legislator periode ini, kami sajikan tema khusus untuk pembaca setia Cirebon Katon. Laiknya mengulas kembali gagasan sejak pertama kali terbit. Kami sajikan beberapa capaian dan kesan dan dinamika para legislator dari pimpinan hingga alat kelengkapan dewan (AKD).

Sementara di akhir tulisan, kami sajikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Cirebon 2019-2024 dan harapan dalam menyongsong Cirebon di masa mendatang.

Selama membe-ri-kan 5 tahun ini, kami mendapatkan banyak kri-

tik, ide dan saran dari segenap pembaca Cirebon Katon. Karena itu, izinkan kami menyampaikan terima kasih luar biasa.

Kami juga mengungkapkan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon 2019-2024 yang telah menyumbangkan pikirannya melalui berbagai rubrik. Memberikan arahan sekaligus menjadi mentor kami dalam berkarya.

Tak lupa kami sampaikan apresiasi spesial kepada seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang selama ini terus mendukung kami menyajikan informasi dan publikasi baik secara daring dan luring. Sehingga kami termotivasi dalam menjadi garda terdepan informasi kinerja DPRD Kabupaten Cirebon.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada kesempurnaan dalam sebuah karya. Kami memohon maaf untuk segala kekurangan dan kekhilafan.

Edisi Agustus ini juga menjadi buah tangan DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024. Mari kita

sambut Cirebon masa depan yang lebih baik dan sejahtera.

Selamat atas dilantikannya para anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024. Semoga dimudahkan dalam menjalankan pengabdian-nya. Selamat membaca. Salam Cirebon Katon!

PEMBINA/PENASEHAT :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan, S.E.
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

PENGARAH :

Hj Eriati
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

H. Sofwan, S.T
(Ketua Komisi 1)

R. Hasan Basori
(Ketua Komisi 2)

Anton Maulana, S.T, M.M
(Ketua Komisi 3)

Aan Setiawan, S.Si
(Ketua Komisi 4)

PIMPINAN UMUM/PIMPINAN REDAKSI :

Asep Pamungkas, SP, MP
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI :
drh. Encus Suswaningsih M.Si
(Kabag Humas Protokol, Kerjasama dan Aspirasi)

Isnaeni Jazilah, S.H, M.H
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

REDAKTUR PELAKSANA :

Dra. Puti Amanah Sari
(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda)

REDAKSI AHLI :

S. Yudi

REDAKTUR :

Yusuf

REPORTER :

• Riyan • Amir

FOTOGRAFER :

Qusoy

DESAIN GRAFIS :

Boyke Datu

DATA DAN RISET :

Oman

DISTRIBUSI :

Firman • Misbah

KORESPONDENSI :

redaksi.cika@gmail.com

PENERBIT :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon

• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | KETUA DPRD

Luthfi:
Teruslah Berorientasi Pada Solusi



14 | FRAKSI

Fraksi PKB:
Kekeluargaan Sangat Terasa



17 | KOMISI

Ketua Komisi I Sofwan:
Periode Ini Evaluasi Berbenah Diri



21 | BK

Ketua BK Munawir:
Kami Pastikan Seluruh Dewan Taat Aturan



22 | LENSA

Lima Tahun Perjalanan
Pelan, Namun Penuh Capaian



24 | BAPEMPERDA

Ketua Bapemperda Eryati:
Harmonisasi Kunci Raperda Berkualitas



25 | SEKWAN

Sekwan Asep Pamungkas:
Kami Puas Berkolaborasi



26 | KABAG

Kabag Umum dan Kepegawaian Wawan Siswandar:
Berharap Sinergi Kedepan Lebih Baik

Luthfi: Teruslah Berorientasi Pada Solusi

Luthfi menegaskan telah berupaya memastikan tri fungsi DPRD berjalan baik. Pada periode ini satu fondasi besar agar belanja daerah berkualitas juga telah diletakkan.

Tepat 16 September 2019 silam di Ruang Abhimata Paripurna, Sumber, suasana lebih ramai dari biasanya. Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Cirebon hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumber.

Hari itu, awal bagi Luthfi memimpin lembaga legislatif untuk 5 tahun berjalan. Bukan tugas mudah. Luthfi menilai, sederet persoalan Kabupaten Cirebon menjadi tugasnya sebagai ujung tombak rakyat.

“Kalau kita lihat posisi Kabupaten Cirebon secara ekonomi di urutan provinsi berada di posisi bawah,” ungkap pemilik nama lengkap Mohamad Luthfi.

Luthfi saat itu mengatakan, bila pembangunan Kabupaten Cirebon dalam sepuluh tahun terakhir, dirasakan seolah jalan di tempat. Tidak ada perubahan signifikan. Terlebih birokrasi yang juga cenderung melakukan rutinitas dan pengulangan program dari tahun ke tahun tanpa tolok ukur.

Hal itu dapat dilihat dari indikator angka kemiskinan, pengangguran yang masih tinggi. Juga masalah populis yang berulang; banjir, sampah hingga jalan berlubang menjadi beranda paling kentara.

Ia pun mulai menganalisis mengapa hal tersebut terjadi. “Bagaimana program dinas selama ini berjalan? Sudahkah postur anggaran APBD telah berorientasi memecahkan masalah? Itu yang saya tanyakan di awal memimpin,” ujar dia.

Politisi PKB ini menilai, seluruh program yang dibuat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sejauh ini hanyalah rutinitas yang bahkan draft tersebut hasil salin tempel. Luthfi men-

...“Kita ingin semua warga Kabupaten Cirebon bahagia,”

jelaskan, seluruh postur anggaran yang dibuat belum berorientasi memecahkan masalah pekerjaan rumah Kabupaten Cirebon.

“Kesannya seluruh program dinas itu *copy paste* dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan dari wilayah lain. Dan ini yang bagi saya menjadi penyebab mengapa selama ini belanja daerah menjadi tidak efektif,” jelas Luthfi.

Belanja Daerah Berkualitas

Oleh karenanya, Luthfi mulai melakukan perubahan kebijakan dalam penyusunan anggaran belanja daerah. Pertama, melakukan pemetaan dan inventarisasi masalah.

“Ini yang penting, bagaimana mungkin dinas membuat sebuah program tapi tidak berpijak terhadap masalah yang terjadi,” ungkap dia.

Kedua, Luthfi juga menginisiasi penyusunan anggaran belanja SKPD mampu memahami substansi masalah. Misalnya mengenai kemiskinan. Pengentasan kemiskinan harus dimulai dari hulu bukan hilir. Untuk itu diperlukan program yang membuka akses lapangan pekerjaan sebanyak mungkin.

“Dan itu sudah kami lakukan dengan kehadiran Satgas Saber Investasi untuk menarik para investor berinvestasi di Kabupaten Cirebon. Kita juga dorong wirausaha dan UKM baru berdiri. Semua program kerja dinas harus mengarah untuk pengentasan masalah,” jelasnya.

Pada periode ini, tahapan penyusunan anggaran daerah SKPD, diharuskan berorientasi menyelesaikan masalah. Dinas diberikan kesempatan untuk mempresentasikan program kerja terlebih dahulu sebelum dibahas dan disahkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Dan alhamdulillah meski belum semua, tapi semua belanja daerah kita maksimalkan efektif artinya belanja daerah kita upayakan berkualitas,” tuturnya.

Ia pun berharap landasan dalam penyusunan anggaran oleh DPRD periode ini dapat terus dilanjutkan. Luthfi mencontohkan bagaimana kehadiran TPA Kubangdeleg telah efektif meminimalisasi penumpukan sampah di wilayah timur Cirebon.

“Sekarang sudah jarang kita lihat sampah bertumpukan di jalan karena TPA Kubangdeleg yang kita inisiasi akhirnya terwujud, itu komitmen kami bersama eksekutif meski pada awalnya banyak yang menolak,” ujar dia.

Luthfi juga berharap, DPRD periode mendatang akan terus mampu membangun kondusifitas seluruh *stakeholder*. Keharmonisan antara legislatif dan eksekutif menjadi penting agar seluruh program pembangunan dapat terwujud.

Ia juga berpesan agar legislator periode 2024-2029, harus mampu menjaga hubungan dengan *stakeholder* eksternal seperti pelaku usaha, guru, wiraswasta, seniman, ormas dan lainnya.

“Alhamdulillah selama ini kami menjalin komunikasi dengan baik. Kita harus pastikan mereka kita gandeng bersama untuk membangun Kabupaten Cirebon. Jangan seolah mereka kita biarkan berjalan sendiri. Kita ingin semua warga Kabupaten Cirebon bahagia,” pungkasnya. •Suf

Rudiana: Kedepan Tugas Dewan Tak Mudah

Rudiana berharap periode saat ini menjadi pembelajaran dan evaluasi untuk perbaikan mendatang, misalnya dalam target penyelesaian raperda.

Bagi sosok satu ini, perbedaan dalam setiap keputusan dan kebijakan adalah hal lumrah. Ia justru menganggapnya sebagai bumbu pelengkap pengabdian. “Tujuan menjadi legislator itu kan pengabdian,” ujar pemilik nama Rudiana.

Tidak boleh ada tujuan lain selain untuk perubahan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon lebih baik. Karena tujuannya sama, ia pun terbiasa dengan perbedaan dalam setiap keputusan.

“Kalau beda pendapat, beda ini dan itu sebenarnya lumrah. Namanya manusia, pola pikir dan latarbelakang bermacam-macam, tapi kita yakini semua yang di sini tujuannya untuk masyarakat,” ungkapnya.

Oleh karenanya, ia berharap, sebelum selesai jabatan, para anggota DPRD dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sehingga pada saat berpindah, anggota DPRD baru bisa menilai, dan melanjutkan apa yang belum dikerjakan. “Yang kurang baik kita bereskan, yang sudah baik kita tingkatkan, seperti itu saja,” ujar pria kelahiran Cirebon, 11 November 1979 ini.

Rudiana menyampaikan, dari total raperda yang diusulkan sejak awal periode, DPRD 2019-2024 telah berhasil mengesahkan 60 % raperda. Sementara ada 5 raperda yang ditargetkan selesai sebelum masa jabatan berakhir pada September 2024 men-

datang. Di antaranya; RTRW, Kabupaten Layak Anak, RPJPD, Pemajuan Kebudayaan dan raperda bantuan hukum untuk orang miskin.

“Dan tadi sudah kita bahas, tinggal menunggu fasilitasi dan persetujuan saja. Insyallah di awal September semua sudah kita setujui,” ungkap pria alumni prodi ekonomi STIE Yasmi Cirebon ini.

Pria yang pernah menjabat ketua PAC PDIP Jamblang tersebut mengatakan, DPRD kedepan, memiliki pekerjaan rumah yang tak mudah. Oleh karenanya, ia berharap periode saat ini menjadi pembelajaran dan evaluasi untuk perbaikan mendatang.

Ia tak menampik ada sebagian anggota DPRD yang lelet dalam mengejar target raperda. Padahal raperda ini merupakan produk utama agar penyelenggaraan pemerintah daerah bisa optimal.

“Kalau sekarang karena sering ngaret dari jadwal. Ini juga jadi pekerjaan rumah buat kesekretariatan dan DPRD nanti. Kita perlu target yang jelas. Misalnya dengan membuat aturan, anggota Pansus DPRD yang jarang hadir, tidak diberikan tugas baru raperda, atau bila perlu tak boleh ikut kunjungan. Ini penting agar semua bisa seirama menyelesaikan target,” ujarnya.

Ia pun berharap, anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode nanti diharapkan lebih tegas dalam mengawasi kinerja eksekutif.

“Karena bagaimanapun nanti yang baru itu akan ngikut dulu. Ikut arus terlebih dahulu. Kalau yang lamanya memberikan contoh yang kurang baik, nanti kedepan bisa ikut begitu kan repot,” terangnya. •Suf



Subhan: Pengabdian Masih Harus Dilanjutkan

Politisi Gerindra ini mengungkapkan Kabupaten Cirebon memiliki setumpuk persoalan yang harus segera dibenahi dan ini pengawasan DPRD harus semakin optimal.

Pengabdian itu tak terbatas karena umur. Barangkali itu yang dapat menggambarkan sosok satu ini. Pria yang menjabat wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon ini mengatakan, pengabdiannya menjadi legislator masih harus dilanjutkan.

“Politik itu itu bukan hanya kepentingan. Saya di politik selalu berusaha menghindari sebisa mungkin perilaku buruk. Bukan berarti saya terselamatkan, namun sebisa mungkin untuk terus memegang prinsip agama Islam,” ujar Subhan.

Pria yang merupakan alumni Universitas Indonesia ini, sudah dua periode menjadi legislator DPRD Kabupaten Cirebon. Dan dipastikan akan duduk kembali setelah terpilih pada Pileg Februari 2024 lalu. Meski demikian, baginya pengabdian menjadi politisi dimaknai sebagai upaya merawat kebaikan jika dimaknai dengan benar.

“Politik itu kekuasaan, boleh begitu diterjemahkannya. Namun harus bertujuan untuk kebaikan. Jika tujuannya adalah kebaikan maka tidak ada pembenaran ketika

melakukannya dengan keburukan,” jelasnya.

Pandangannya mengenai politik tidak dimaknai secara pragmatis. Jika politik diartikan sebagai seni atau upaya untuk mendapatkan kekuasaan, maka harus bertujuan pada kebaikan.

“Orang bilang di politik itu kepentingan. Nah tergantung kita memaknainya. Namanya kita hidup memiliki kepentingan. Tapi kepentingan yang bagaimana. Kadang orang mengartikan kepentingan itu selalu bersandar keburukan. Padahal tidak semua buruk,” tuturnya.

Oleh karenanya, selama menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon 2019-2024, Subhan, hampir tak pernah absen dalam setiap kali rapat maupun kunjungan pengawasan.

Politisi Gerindra ini mengungkapkan Kabupaten Cirebon memiliki setumpuk persoalan yang harus segera dibenahi. Misaln-

ya dalam perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), kesehatan, infrastruktur hingga lapangan pekerjaan. Oleh karenanya, kegiatan pengawasan, penganggaran dan legislasi adalah tugas wajib seorang legislator.

“Saya selalu mengusahakan ikut setiap kali kunjungan kerja. Karena bagi saya ini amanah yang harus dijalankan agar setiap kebijakan pemerintah daerah benar-benar terawasi dan terukur,” pungkas pria kelahiran Cirebon 1963 ini. •Suf



Teguh: Kita Ingin Cirebon Punya Skala Prioritas

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Cirebon, menurut Teguh, karena ketidakmampuan dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka mengatakan, perjalanan 5 tahun menjadi anggota DPRD bisa dibilang waktu yang cukup singkat. Beragam catatan positif dan negatif tentu ada. Apalagi di periode ini, dua tahun sempat terganggu karena pandemi dan berpengaruh terhadap target kerja DPRD.

Menurutnya, ia bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon masih memiliki tanggungjawab hingga 16 September 2024 mendatang. Pertama, tugas mengesahkan raperda yang harus segera diselesaikan. Kedua, kewajiban memastikan seluruh kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pria yang menyukai taekwondo ini berharap, kedepan para legislator harus semakin memacu etos kerjanya. Pasalnya Kabupaten Cirebon masih memiliki banyak persoalan dan pekerjaan rumah yang menanti.

Sebagai politisi yang mewakili anak muda, Teguh ingin posisi kepemimpinan dan olahra-

ga Kabupaten Cirebon bisa maju. "Selain memang tugas yang wajib untuk memastikan kesehatan, pendidikan, infrastruktur terwujud, kita ingin anak muda Cirebon mendapat perhatian khusus," ujar pria alumnus Universitas Trisakti ini.

Di sisi lain, dengan 2,3 juta penduduk, kurang lebih 10 % kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Dan ini yang harus dilakukan DPRD Kabupaten Cirebon agar efektifitas kebijakan anggaran dapat mengentaskan pelbagai persoalan tersebut.

Teguh menilai, tidak semua

daerah memiliki karakteristik unik lainnya Cirebon. Terlebih, letak geografis yang berpeluang memberikan potensi ekonomi. Meski demikian keidealan dan kenyataan tampak sangat kontras. Pengangguran terbuka, angka pendidikan rendah hingga kerusakan jalan menjadi beranda yang paling kentara.

"Hari ini saya lihat kepala daerah belum memiliki skala prioritas. Saya contohkan kurang lebih ada 1400 km jalan, berapa persen yang hari ini rusak dan sudah diperbaiki? Pengangguran di Cirebon banyak, padahal pabrik juga banyak, kenapa kita tidak bisa menyerap tenaga kerja dan tidak bisa menurunkan angka kemiskinan?" tanyanya.

Maka menjadi harus, bila kedepan Kabupaten Cirebon harus dikelola oleh orang yang kompeten di bidangnya.

"Kami di Fraksi Golkar selalu mengajak mari bangun Cirebon barengan. Agar kemajuan itu lebih dekat, kemiskinan bisa turun, pendapatan meningkat, kesehatan tercover dan anak bisa sekolah dengan baik. Itu harapan yang tidak muluk," tandasnya.

•Suf



Fraksi PKB: Kekeluargaan Sangat Terasa

Selama periode ini, Fraksi PKB selalu berupaya membangun rasa kekeluargaan antar anggota guna menggenjot kinerja aspirasi warga.

Rasa kekeluargaan barang kali itu yang dapat digambarkan dalam fraksi ini. Selama lima tahun perjalanan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Kabupaten Cirebon selalu berupaya membangun keharmonisan antar anggota dengan pertemuan rutin.

“Kita setiap bulan, selalu bergiliran dari anggota satu ke anggota yang lain, bersilaturahmi dengan berkunjung ke rumah,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cirebon Darusa.

Pria yang hobi *off road* ini mengaku, selama menjadi bagian dari fraksi, tidak pernah absen dalam pertemuan rutin tersebut. Meski terlihat biasa, namun manfaat dari pertemuan itu yang justru semakin menguatkan satu sama lain.

“Apalagi dengan silaturahmi

mi ke seluruh dewan, ada saja makanan khas yang selalu dihadirkan. Misalnya kalau bertemu ke Pak Mad Saleh di Ciledug, istrinya pasti masak jengkol gepuk dan banyak lagi. Dan ini yang bagi kami cara untuk tetap solid,” tuturnya.

Hal kecil tersebut, kata Darusa, pada akhirnya membangun rasa kekeluargaan dalam internal Fraksi PKB hingga saat ini.

Di sisi lain, dengan pertemuan rutin, kinerja anggota fraksi dapat terus dipacu dan dievaluasi. “Kita juga akhirnya bisa saling membantu persoalan yang terjadi di dapilnya masing-masing,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan, Fraksi PKB selama 5 tahun sangat konsisten dalam memperjuangkan aspirasi dan persoalan yang terjadi di masyarakat. “Kita selalu dorong,

kalau ada masyarakat kesulitan mendapatkan BPJS misalnya, selalu kita *support*,” tegasnya.

Darusa mengatakan, perolehan 10 kursi pada Pileg 2019 silam, Fraksi PKB telah berhasil menempatkan anggotanya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.

Pria yang pernah menjabat kepala desa ini mengucapkan terima kasih atas kinerja seluruh anggota Fraksi PKB 2019-2024. Ia berharap pada periode mendatang, Fraksi PKB bisa tetap solid dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan banyak orang.

“Kami berharap kedepan selain bisa meneruskan program-program di Fraksi PKB, juga harus terus bermanfaat bagi masyarakat banyak,” pungkasnya. •Soy



Fraksi PDIP: Menyusun Raperda Peduli *Wong Cilik*

Perjuangan untuk wong cilik adalah visi partai ini. Jelang berakhirnya periode, Fraksi PDIP menginisiasi raperda bantuan hukum untuk orang miskin.

Merah membara menjadi nafas perjuangan bagi kader-kader terbaik Fraksi PDIP Kabupaten Cirebon. Melaksanakan mandat rakyat, membela *wong cilik* mewujudkan kesejahteraan, sudah menjadi kewajiban fraksi membawa fatsun dan misi partai. Melaksanakan program partai sesuai tugas dan fungsi lembaga legislatif.

“Berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana mengawal kebijakan pemerintahan untuk pro kepada rakyat,” jelas Rohayati, anggota Fraksi PDIP Kabupaten Cirebon.

Pada Pemilu 2019 silam, PDIP berhasil menempatkan delapan kader terbaiknya menduduki lembaga legislatif Kabupaten Cirebon. Satu di antaranya menjadi pimpinan DPRD. Mayoritas dari mereka merupakan anggota dewan berpengalaman. Sehingga, peran dan perjuangan mereka tak perlu diragukan.

Meski sempat terganggu karena pandemi, namun, kata Rohayati, Fraksi PDIP tetap konsisten menjadi pelopor dalam berbagai kebijakan rancangan peraturan daerah (raperda).

Ia dan anggota Fraksi PDIP lainnya berusaha mengoptimalkan waktu dan memaksimalkan

langkah agar bermanfaat untuk masyarakat.

Benar saja, kesolidan mesin partai serta kemampuan membangun kepercayaan, buah tersebut dapat dibuktikan pada Pemilu 2024 lalu. Mereka berhasil menghantarkan kadernya 13 kursi. Dalam kata lain, periode 2024-2029 nanti, Fraksi PDIP akan memimpin lembaga DPRD.

Rohayati menyampaikan, perjuangan untuk *wong cilik*, Fraksi PDIP memulainya dengan inisiator perda yang pro rakyat. Mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tepat sasaran dan transparan, serta memaksimalkan anggaran agar terserap untuk pembangunan dan kesejahteraan.

“Kami terus mengarahkan dinas-dinas terkait agar mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Cirebon,” jelasnya.

Empat bulan jelang pergantian DPRD 2019-2024, Fraksi PDIP juga menjadi ujung tombak dalam pembentukan raperda Bantuan Hukum untuk Orang Miskin. Dimana ketua pan-sus raperda ini merupakan anggota Fraksi PDIP.

“Bagi kami raperda bantuan hukum untuk

orang miskin, adalah langkah kami pro *wong cilik*. Hari ini akses bantuan hukum baru bisa diperoleh untuk orang mampu. Kita ingin ada kesetaraan,” pungkask Rohayati. •Soy



Fraksi Golkar: Ekonomi Kerakyatan Jadi Visi Perjuangan

Selama ini, Fraksi Golkar selalu mewajibkan anggotanya turun langsung dalam menampung semua aspirasi. Menjadikan masyarakat sebagai objek yang harus dilayani.

Dari sekian banyaknya partai, barang kali partai beringinlah yang paling berumur. Meski demikian, pergantian era tak membuat partai yang pernah memimpin 32 tahun ini tumbang. Justru tetap kokoh hingga kini. Era modern yang surplus anak muda justru tumbuh kader-kader muda Golkar yang solid dan mantap berkiprah. Pun dengan fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cirebon.

Muda berkarya begitulah semangat yang mereka usung. Selama periode 2019-2024, dari total 7 kursi yang diperoleh, Fraksi Golkar selalu konsen terhadap isu kerakyatan dan kepemudaan.

"Kami ingin Kabupaten Cirebon maju, damai, masyarakat yang mandiri, punya semangat kekarya, masyarakat yang beriman dan bertaqwa. Itulah visi kami," jelas Diah Irwani In-

driyati, sekretaris Fraksi Golkar Kabupaten Cirebon.

Menjadi wakil rakyat adalah sebuah amanah besar. Menjadi jembatan rakyat untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Komitmen Golkar untuk menggapai visi tersebut diupayakan dengan menjaring kader-kader terbaik. Membina dan menanamkan semangat kekarya juga memperjuangkan segala kebijakan kerakyatan dan kepemudaan.

"Beberapa hal yang menjadi konsen, misalnya kesehatan, olahraga dan pemuda. Itu amanat partai untuk senantiasa berjuang," ungkap Diah.

Setiap anggota dewan Frak-

si Golkar, harus selalu terjun ke masyarakat. Mendengarkan keluhan kesah langsung dan menampung semua aspirasi. Menjadikan masyarakat sebagai objek yang harus dilayani agar menikmati program-program pemerintah.

"Kita kedepankan ekonomi kerakyatan. Tidak seperti dahulu ketika hanya elit dan konglomerat yang menikmati, tapi sekarang kita harus kedepankan UMKM," jelas politisi Dapil 6 Cirebon ini.

Ia berharap agar kepala daerah kedepan serta anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode baru bisa melanjutkan estafet dan menyelesaikan pekerjaan rumah Kabupaten Cirebon.

Selama menduduki kursi parlemen ini, Diah menilai banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Pada sektor pertanian misalnya, ia kerap mendapat keluhan sulitnya akses air atau pupuk.

"Jadi kedepan bagi kami, butuh pemimpin Kabupaten Cirebon yang memiliki gagasan visioner, dan mampu menggerakkan SKPD untuk bisa menjalankan visi dan menyelesaikan pekerjaan rumah nanti," pungkasnya. •Soy

Fraksi Gerindra: Kami Perjuangkan Semua Isu Populis

Sebagai prajurit partai, Fraksi Gerindra konsisten perjuangkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Hal itu sebagaimana arahan ketua umum partai.

Meski mengawali karirnya sebagai guru, Nana tak hanya lantang bicara soal pendidikan, namun juga soal kesehatan, infrastruktur, pertanian dan ekonomi. Baginya Fraksi Gerindra konsisten perjuangkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Hal itu sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sejak pertama kali dilantik pada 2019 silam, pemilik nama lengkap Nana Kencanawati ini mengungkapkan seluruh anggota Fraksi Gerindra selalu bertemu dengan masyarakat. Legislator Gerindra sangat serius memberi perhatian terhadap masalah populis. Ia pun mengklaim, Fraksi Gerindra selalu memotori aspirasi warga.

Misalnya saat ada warga pra sejahtera yang belum memiliki jaminan penyangga (BPJS), Nana sering kali memaksa Dinkes agar segera memasukannya sebagai penerima BPJS PBI yang dibiayai APBD. "Saya sangat prihatin kalau mendengar ada warga tak

mampu kesulitan berobat. Kita Fraksi Gerindra dikader untuk punya empati tinggi," ungkapnya.

Di sisi lain, Nana juga aktif dalam mengupayakan agar angka rata lama sekolah bisa meningkat. Menurutnya angka putus sekolah di Kabupaten Cirebon masih tinggi.

"Itu baru dua hal, belum bicara bagaimana akses permodalan, perbaikan jalan dan kebersihan lingkungan. Kita masih tertinggal dengan kabupaten sebelah. Ini yang harus terus menjadi komitmen bersama eksekutif dan legislatif," jelasnya.

Nana menegaskan, arahan ketua umum partai selalu meminta agar para kadernya ber-

buat baik bagi masyarakat maupun lingkungan. "Kita sebagai kader atau prajurit selalu taat dan patuh terhadap perintah pimpinan," tegasnya.

Selama menjabat ketua fraksi ini, Nana pun kerap berkeliling di beberapa tempat untuk bertemu dengan masyarakat. Menurutnya, hal itu agar ia bisa mengetahui segala kebutuhan rakyat berdasarkan kenyataan di lapangan.

"Suka dukanya kadangkala kadang kita bekerja itu tidak ada waktu libur kadang kala malam juga kita tetap bekerja. Misalnya waktu banjir di Waled, tapi memang sudah kewajiban bagi kami," paparnya.

Baginya apa yang dilakukan itu semata-mata menaati arahan pimpinan bila perjuangan terhadap rakyat selalu akan mendapatkan buah. Ia pun berpesan anggota dewan kedepan bisa mengemban tugas lebih baik lagi. "Kita harus berikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cirebon," pungkasnya. •Soy

Fraksi NasDem: Konsisten Restorasi Cirebon

Titi berharap, di periode mendatang, Fraksi NasDem terus konsisten dalam menyerap aspirasi dan mengupayakan restorasi Cirebon.

Siapa yang terngiang saat mendengar kata 'Restorasi Indonesia'? Dua kata ini menjadi ciri khas nilai perjuangan Fraksi NasDem. Nilai itulah yang juga diaplikasikan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi NasDem periode 2019-2024.

"Bedanya hanya tempat, kami konsisten restorasi Kabupaten Cirebon," ujar Titi Sumanthi, sekretaris Fraksi Nasdem Kabupaten Cirebon.

Restorasi Kabupaten Cirebon bukan tanpa alasan. Menurut Titi, banyak persoalan yang harus segera dibenahi di antaranya mengenai pertanian dan kesehatan. Selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Titi acap kali mendapat keluhan dari warga, mengenai sulitnya mendapatkan jaminan kesehatan gratis hingga pertanian.

"Saya selalu menyempatkan waktu untuk bertemu dengan masyarakat. Dan hampir tiap hari, beragam keluhan itu datang. Mulai soal jalan rusak, BPJS sampai pupuk subsidi," ungkap Titi.

Titi yang juga menjabat anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menilai, sektor pertanian memiliki banyak persoalan di antaranya irigasi sekunder, tersier hingga sulitnya

akses distribusi pupuk.

Oleh karenanya, selama ini ia senantiasa mendorong pemerintah daerah untuk memastikan pupuk bersubsidi terdistribusi tepat sasaran. Titi juga menyekalkan sulitnya akses air saat musim kemarau bagi para petani.

"Mungkin terdengar klise, tapi masalah ini sangat serius, pertanian sektor yang merupakan terbesar di Kabupaten Cirebon. Namun para petani kita masih sulit mendapatkan pupuk subsidi dan air saat musim tanam dan itu terjadi di dapil 6 yang memang sektor pertaniannya lumayan," ungkapnya.

Selain pertanian, Titi juga menilai masih banyak warga yang belum menerima manfaat dari kesehatan gratis. "Jadi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh anggota DPRD periode yang akan datang," paparnya.

Fraksi NasDem, kata Titi, senantiasa terbuka untuk masyarakat yang ingin melaporkan persoalan yang terjadi di daerahnya masing-masing.

"Kami Fraksi NasDem terus berupaya agar keberadaan kami di sini benar-benar membawa perubahan bagi Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan kedepan, anggota DPRD kami bisa meneruskan dan menyelesaikan sekaligus memperbaiki apa yang menjadi PR," pungkasnya. •Soy

Fraksi PKS: Kami Rutin Promosikan Raperda

Bagi Junaedi, ruang rapat dengar pendapat, rapat komisi adalah momentum terbaik mengukur bahwa DPRD adalah macannya rakyat.

Bercirikan bentuk bulat berwarna oranye dengan semangot keislaman, Fraksi PKS Kabupaten Cirebon diakui konsen terhadap isu keagamaan, keadilan dan kesejahteraan.

"Tidak hanya berhenti pada gagasan besar, tapi gagasan itu harus dapat disajikan secara cepat dan terarah oleh seluruh anggota fraksi PKS," ujar Junaedi, anggota Fraksi PKS Kabupaten Cirebon.

Hal itu pula yang membuat Junaedi acap kali memberikan otokritik internal. Misalnya dalam budaya dan sistem kerja DPRD, Junaedi menilai belum ada inovasi dan improvisasi. Tantangan agar DPRD mampu menghasilkan produk legislasi berkualitas belum terbukti. Sementara fungsi pengawasan juga hambar.

Dari sisi rutinitas rapat, pria alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini juga mengevaluasi perlunya perbaikan di masa mendatang. Kesadaran untuk hadir dalam kegiatan pengawasan, kata Junaedi, belum terinternalisasi seluruh anggota. Padahal kehadiran pengawasan itu penting karena berkelindan

dalam membuat kebijakan.

Junaidi juga berharap, kedepan jadwal penyusunan raperda dan kehadiran forum paripurna bisa optimal. Menurut legislator 4 period ini, kedepan anggota DPRD Kabupaten Cirebon harus benar-benar serius dalam mengikuti seluruh tahapan kegiatan.

Keberhasilan seorang legislator, dapat dilihat dari bagaimana mereka mampu belanja masalah dari bawah. Sehingga mampu memberikan masukan, penganggaran yang ideal. Ia juga meminta nalar kritis seorang legislator tak boleh hilang. Ruang rapat dengar pendapat, rapat komisi adalah momentum terbaik bahwa DPRD adalah macannya rakyat.

"Kami sangat keras kalau soal mutasi birokrasi misalnya, Bahwa pada akhirnya tetap terjadi kita terima. Paling tidak, kita sudah ikhtiar kalau soal mutasi pegawai harus benar sesuai aturan," jelas pria yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar

XII pada Pileg 2024 lalu.

Di sisi lain, Junaedi mengungkapkan, bila Fraksi PKS setiap tahun tak pernah lupa untuk endorse atau mempromosikan raperda. Di antara inisiatif raperda yang berhasil disahkan ialah raperda disabilitas dan UMKM.

"Walaupun inisiatif DPRD, tapi Fraksi kami paling rutin promosikan raperda tiap tahun. Karena kami juga konsen membuat kegiatan dengan asosiasi para penyandang disabilitas di DPD PKS Kabupaten Cirebon," pungkash pria yang juga menjabat Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon ini. •Suf

Fraksi Demokrat: Konsen Perjuangkan Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan

Memperjuangkan aspirasi, dan mewajibkan anggotanya membaca literasi agar tajam memberi solusi, menjadi kiat FPD selama lima tahun terus pro rakyat.

Tegak lurus terhadap garis partai, Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kabupaten Cirebon pun berposisi siap sejak awal dilantik pada 2019 silam. Benar saja, dalam perjalannya setiap anggota FPD telah mempersembahkan kinerja yang pro rakyat.

Anggota Fraksi Demokrat Tarseni mengatakan, selama ini, Fraksi PD DPRD Kabupaten Cirebon 2019-2024 selalu terbuka dengan semua keluhan masyarakat. Hampir tiap hari, keluhan warga mampir di kantor fraksi.

Keluhan dan aspirasi yang biasa mereka terima lebih banyak menyangkut kebutuhan dasar. Masyarakat merasa kesulitan mendapatkan administrasi, BPJS hingga lapangan pekerjaan.

Ia pun mengaku, Fraksi PD menindaklanjuti keluhan tersebut ke dinas tertentu hingga mengundang rapat dengar pendapat. Menurutnya, isu kesehatan dan lapangan pekerjaan menjadi konsen fraksi di akhir periode.

Seperti diketahui, *Universal Health Coverage* (UHC) Kabupaten Cirebon tengah mengalami penurunan. Akibatnya pengajuan BPJS gratis sedang tidak bisa dilakukan.

Tarseni menuturkan, Fraksi Demokrat selalu memberi masukan kepada pemerintah daerah

untuk membenahi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS yang dibiayai APBD. Pasalnya selama ini, masih banyak warga yang belum *tercover* jaminan kesehatan tersebut.

“Masalahnya memang dari data yang tidak update. Ada warga meninggal, tapi masih sebagai penerima BPJS. Akibatnya kuota ini habis. Ini yang selalu kami perjuangkan untuk segera dibenahi data penerima manfaat ini. Jangan sampai banyak warga tidak bisa berobat karena pemerintah diam saja,” tuturnya.

Perempuan yang pernah berkuliah di Institut Pendidikan dan Ilmu Keguruan (IKIP) Bandung ini mengungkapkan, Fraksi Demokrat selalu solid dalam memperjuangkan kepentingan warga Kabupaten Cirebon. “Di fraksi tidak ada dinamika internal semuanya solid dan kami seperti saudara sendiri,” ungkap legislator dua periode ini.

Sekretaris Komisi I ini juga menegaskan, Fraksi PD senantiasa melakukan pertemuan rutin khusus membahas isu-isu kekinian. Hal itu dimaksudkan agar program pro rakyat dapat terwujud.

“Ini juga berguna agar seluruh anggota lebih tajam dalam memahami setiap persoalan dan langkah untuk menyelesaikan solusi. Semoga periode kedepan kami bisa terus semakin lebih baik,” tandasnya. •Suf

Ketua Komisi I Sofwan: Periode Ini Evaluasi Berbenah Diri

Kehadiran wajah baru anggota DPRD mendatang, Opang meyakini akan ada terobosan yang mengubah citra dan kinerja.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan, ST atau akrab disapa ‘Opang’ sudah banyak merasakan asam garam selama mengemban tugas menjadi legislator Kabupaten Cirebon. Pasalnya, dua periode sudah Opang menjadi legislator, dan akan menjabat kembali untuk periode 2024-2029.

Selama menjadi ketua komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Opang selalu lantang bila membahas bidang pemerintahan. Dalam setiap paripurna, Opang sering kali menyoal hak dan kepentingan warga.

Tak hanya lantang terhadap kebijakan pemerintah daerah, ia pun seringkali melempar kritik kepada sesama anggota DPRD yang terkesan “bandel”. Meski terdengar aneh karena celotehnya justru menyoal internal, namun hal itu ia tunjukkan agar ada perbaikan.

Misalnya soal presensi anggota yang sering absen saat rapat, Opang tak segan mengkritik. Pasalnya bagi Opang, hal tersebut menyangkut kepercayaan publik terhadap instansi.

“Sama sekali tidak ada tujuan menjatuhkan atau apapun, semata-mata ini sebagai evaluasi agar kedepan wajah DPRD bisa lebih baik lagi, dan saya konsisten untuk itu,” tegas Opang.

Sikap politisi Gerindra terse-

but dilandasi atas tugasnya di Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, pemberdayaan masyarakat yang menyangkut pokok hidup banyak orang.

Opang menjelaskan, seorang anggota legislator sudah semestinya memiliki kesiapan dan disiplin saat meramu kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Karenanya, kehadiran mereka dalam setiap rapat mutlak dibutuhkan bukan malah sebaliknya.

Ketika disinggung soal kesan selama kebersamaan anggota DPRD periode 2019-2024, pria bergelar sarjana teknik itu mengatakan, semua berjalan normal dan wajar.

“Bagi saya selama ini perjalanan kita normal dan tidak ada yang terlalu menonjol, bahwa ada beberapa hal yang kurang sesuai itu akan kami evaluasi untuk terus berbenah lebih baik lagi kedepan,” ujarnya.

Ia berharap, pada periode mendatang, DPRD Kabupaten Cirebon dapat berbenah diri. Kehadiran anggota DPRD baru semoga menjadi lokomotif agar institusi wakil rakyat ini bisa semakin *ngebut* menjalankan tugasnya.

“Apalagi, setengah lebih anggota akan diisi wajah baru, jadi kita berharap kedepan akan ada terobosan yang mengubah citra dan kinerja,” tandasnya.

Ketua Komisi II Hasan: Kami Fokus Optimalisasi PAD

Bagi Hasan, bila pemerintah daerah mampu mengoptimalkan PAD, maka beberapa persoalan yang menjadi pekerjaan rumah Cirebon akan mudah teratasi.

Bicara soal pendapatan asli daerah (PAD), tentu merupakan tugas dan wewenang komisi II yang merupakan alat kelengkapan dewan dalam menaungi bidang perekonomian dan keuangan. Mengenai itu, DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 melalui komisi II, dinilai sangat fokus dalam mendorong peningkatan sektor PAD.

"Misalnya dalam retribusi parkir, kita audit agar mengurangi terjadinya kebocoran. Kami juga selalu audit ke dinas yang bertanggungjawab terhadap sektor PAD untuk optimalkan sumber-sumber yang bisa meningkatkan pendapatan," ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Raden Hasan Basori.

Politisi PKB itu juga mengungkapkan, Komisi II telah mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperbaiki sistem dan tata kelola agar capaian PAD optimal. Pertama, dengan mengupayakan merit sistem terwujud. Kedua, sistem pajak berbasis web dan evaluasi manajemen.

Pria yang merupakan alumnus Universitas Riau ini berharap, capaian PAD Kabupaten Cirebon akan meningkat. Menurutnya, dengan potensi yang besar ini, semestinya perolehan PAD bisa lebih baik. "Kalau kita lihat, masih banyak kantong-kantong yang belum dioptimalkan untuk dikonversikan menjadi pendapatan daerah. Dan ini yang selalu

kita dorong," ungkapnya.

Baginya, bila pemerintah daerah mampu mengoptimalkan PAD, maka beberapa persoalan yang menjadi pekerjaan rumah Cirebon akan mudah teratasi. "Karena kalau hanya mengandalkan APBD sangat terbatas, PAD kita baru Rp 800 miliar. Sementara setengahnya sudah habis belanja pegawai, makanya peningkatan PAD menjadi wajib. Kita tergetkan 1 triliun kedepan," jelasnya.

Target keseriusan itu, bagi Hasan, merupakan wujud kehadiran legislator sebagai intermediasi antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Ia juga menyampaikan, seorang legislator semestinya bukan sekadar menjalankan fungsi struktural, tapi secara aktif diimbangi dengan fungsi kultural.

Fungsi struktural yang dimaksud adalah tugas DPRD seperti yang tertuang dalam undang-undang MD3 yakni pengawasan, penganggaran dan legislasi. Sementara fungsi kultural yakni melakukan interaksi langsung kepada masyarakat sehingga mampu memahami fenomena yang terjadi.

"Saya sangat bahagia dan merasakan rasa kekeluargaan selama kebersamaan anggota

DPRD Kabupaten Cirebon 2019-2024. Pada intinya, harapan kami kedepan, amanat Sunan Gunung Jati "Titip Tajug lan Fakir Miskin" dapat diwujudkan. Dalam arti hari ini pendidikan, ekonomi warga meningkat dan sejahtera," pungkask pria alumnus Magister Manajemen UI ini. •Mir



Ketua Komisi III Anton: Kami Konsisten Akselerasi Perbaikan Jalan

Di sisa waktu pengabdian, Anton bersama Komisi III ingin perbaikan infrastruktur Kabupaten Cirebon bisa terakselerasi dan terwujud.

Sejak pertama kali dimandatkan sebagai pimpinan komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, tak tinggal diam. Ia bersama anggota komisi III, bersicepat melakukan kunjungan dengan menyerap aspirasi warga. Tak lupa pula, rapat dengan dinas tertentu untuk menemukan solusi. Anton cukup menyesali kondisi infrastruktur Kabupaten Cirebon yang sering kali dikhianatkan warga.

"Kita tahu, bahwa infrastruktur fisik kita masih memiliki pekerjaan rumah yang tak sedikit. Kerusakan jalan, jembatan, senderan masih banyak di beberapa titik. Ini yang kita konsisten perjuangkan," ujarnya.

Politisi Golkar ini menegaskan, bila aksesibilitas jalan Kabupaten Cirebon menjadi beranda yang paling banyak disorot warga, bahkan menjadi bual-bualan di sosial media. Oleh karenanya, Komisi III tak pernah absen mendorong dinas agar perbaikan-perbaikan infrastuktur dapat dipercepat.

Infrakstrur jalan terutama, kata Anton, memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup serta masyarakat yang sejahtera.

Namun begitu, pria yang juga menjabat Keluarga Alumni HMI

(Kahmi) Cirebon ini menyadari, dalam mendorong perbaikan seluruh kerusakan infrastruktur tak semudah membalik tangan. Diperlukan kepiawaian kepala daerah dalam mengelola sekaligus mengais anggaran.

"Kalau kita hanya mengandalkan dari APBD saja, perbaikan jalan tentu sangat terbatas. Sementara kerusakan jalan kita ratusan kilometer. Ini yang pada akhirnya dilematis," tuturnya.

Belum lagi pada periode ini, Indonesia sempat mengalami pandemi yang melanda seluruh daerah hingga menghambat percepatan pembangunan. Beberapa rencana anggaran perbaikan otomatis mengalami *refocusing* sehingga tak memenuhi target.

Anton mengungkapkan, meski dihadapkan pada situasi yang tak menguntungkan, ia bersama Komisi III tetap berupaya agar progres pembangunan infrastruktur fisik tetap berjalan. Ia berharap di sisa waktu pengabdian periode ini, semua target kinerja perbaikan infrastruktur Kabupaten Cirebon bisa terakselerasi dan terwujud tanpa kendala apapun. •Mir



Ketua Komisi IV Aan: PR Kami Masih Banyak, Perlu Kesenambungan

Pengawasan secara optimal tak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Aan menilai, perlu kesinambungan agar seluruh program pemerintah daerah dapat dirasakan manfaatnya

Keluhan dan laporan warga hampir tak absen dalam setiap harinya. Pasalnya, alat kelengkapan dewan (AKD) satu ini memiliki tugas untuk mengawasi setiap kebijakan pemerintah daerah terutama berkaitan isu populis. Di antaranya, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, pendidikan, hingga pariwisata. Tak ayal, hajat banyak orang lainnya parkir di sini.

"Tapi ini yang bikin asyik, namanya perjuangan menjadi wakil rakyat," ungkap Aan Setiawan, ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon.

Menurut Aan, Komisi IV memiliki peran sangat strategis karena menjadi ujung tombak wajah Kabupaten Cirebon. Ia pun men-

gungkapkan selama ini, Komisi IV telah bekerja dalam pengawasan seluruh kebijakan pemerintah daerah berkaitan kesejahteraan warga Kabupaten Cirebon.

Meski demikian, pekerjaan rumah untuk Komisi IV masih banyak. Pengawasan secara optimal tak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dibutuhkan kesinambungan agar seluruh program pemerintah daerah dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.

Misalnya di bidang kesehatan, Aan menilai, stunting masih menjadi perhatian karena masalah ini merupakan hal mendasar yang harus segera dicegah. Stunting masih menghantui banyak daerah, tak terkecuali Kabupaten Cirebon.

Sementara dalam bidang ketenagakerjaan, Aan juga terus berupaya untuk meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Komisi IV secara aktif melakukan kunjungan kerja ke seluruh perusahaan.

"Kami sering berkunjung ke perusahaan untuk mencegah pungli atau praktik yang merugikan para pekerja," ungkapnya.

Terakhir, Aan juga terus mendorong perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Politisi PDIP ini menuturkan jika data penerima manfaat dalam DTKS mengalami ketidakselarasan sehingga perlu perbaikan dan evaluasi. "Soal data DTKS terus kita kejar dan alhamdulillah saat ini angkanya sudah 80 persen. Semoga kedepan DTKS semakin presisi," ujar Aan.

Untuk sektor pariwisata, lanjutnya, Komisi IV juga tengah mendorong agar setiap desa memiliki wisata khas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

"Itu akan sinkron dengan raperda Ripparda yang saat ini sedang kami bahas dan akan disahkan dalam waktu dekat. PR kami tentu masih banyak, dan memang tidak mungkin selesai dalam waktu singkat," tandasnya. •Mir

Ketua BK Munawir: Kami Pastikan Seluruh Dewan Taat Aturan

Selama lima tahun berjalan, BK DPRD Kabupaten Cirebon diakui sangat getol menertibkan seluruh anggota dewan menjalankan fungsinya dengan baik.

Salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) yang bertugas mengevaluasi kedisiplinan dan kepatuhan anggota DPRD yakni Badan Kehormatan (BK). Selama periode 2019-2024, beberapa kali pimpinan BK DPRD Kabupaten Cirebon berganti.

Meski demikian, lembaga tetap milik DPRD ini, diakui telah banyak menjaga muruah legislator. Bila ada anggota DPRD yang *bandel*, tak segan-segan BK akan menegur hingga memberikan sanksi.

"Alhamdulillah meski berganti-ganti pimpinan, kami telah bekerja dengan baik. Dan selama periode ini, hampir tidak laporan mengenai kode etik para anggota dewan. Artinya 50 anggota dewan kami telah bekerja baik menjaga kode etik," ungkap Ketua BK DPRD Kabupaten Cirebon Munawir.

Namun begitu, selama 5 tahun berjalan, bukan tidak ada sama sekali dinamika yang terjadi maupun aduan melalui BK.

"Ya tetap ada saja, kaya waktu itu ada aduan dari kuwu, aduan dari warga. Tapi semua aman dan kondusif," jelasnya.

Politisi NasDem ini menegaskan, BK telah berupaya mengoptimalkan fungsinya dengan senantiasa berkoordinasi dengan seluruh fraksi mengenai tata tertib DPRD.

BK juga berusaha menertibkan anggota DPRD yang absen mengikuti kegiatan seperti rapat komisi, rapat AKD dan yang lainnya. Karena sesuai dengan peraturan DPRD mengenai kehadiran, ketika ada yang melanggar akan di tindaklanjuti oleh BK.

Menurut Munawir, Di DPRD tingkat Provinsi, BK memberikan *reward* kepada anggota-anggota yang aktif dan inovatif. Dalam acara BK Award terdapat berbagai macam nominasi untuk anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat.

"Kalau di DPRD Kabupaten Cirebon punya BK Award tentu an menambah semangat teman-teman dewan yang lain," ujar pria yang hobi lari pagi itu.

Munawir juga menjelaskan, selama menjadi pimpinan BK, ia mampu mempererat dan menjalin hubungan baik dengan seluruh fraksi.

"Bagi saya, amanah menjadi ketua BK ini menjadi jalan bisa memahami semua karakter 50 anggota dewan. Saya juga bisa saling silaturahmi dengan para anggota dewan ini. Semoga periode mendatang BK ini akan terus berinovasi memastikan para anggota DPRD bekerja sebagaimana mestinya," pungkasnya. •Soy



Lima Tahun Perjalanan Penuh Capaian

Pelan, namun penuh kepastian, itulah yang dapat digambarkan kinerja anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024.

Sejak pertama dilantik pada September 2019 silam, DPRD telah berscepat menginsiasi rancangan peraturan daerah (raperda), melakukan pengawasan ke setiap mitra kerja, juga kewajiban menyusun anggaran belanja daerah. Tak lupa tugas

menyerap aspirasi publik.

Tahun kedua, tak pernah terbayangkan akan ada wabah pandemi Covid-19. Namun tak menjadi alasan kinerja menyurut. Para legislator tetap berlanjut dengan kinerja yang menerapkan protokol kesehatan.

Tahun ketiga, sarana bangkit pasca pandemi. Belasan raperda kembali digulirkan dan sebagian besar berhasil diparipurnakan. Tahun keempat,

DPRD Kabupaten Cirebon berhasil menginisiasi berdirinya TPA Kubangdeleg guna mengentaskan persoalan sampah di wilayah timur Cirebon.

Tahun terakhir adalah langkah menuntaskan program kerja dan evaluasi. Periode ini harus lebih baik dari kemarin, dan periode esok harus lebih baik dari hari ini. Jika, tidak maka kita masuk dalam golongan orang yang merugi.



Ketua Bapemperda Eryati: Harmonisasi Kunci Raperda Berkualitas

Meski belum semua raperda tercapai sesuai target, namun diakui Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon telah berhasil memastikan payung hukum prioritas terwujud.

Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itulah kalimat yang disampaikan Eryati mengawali pembicaraan. Eryati merupakan ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Cirebon. Tugas Badan Legislatif ini

adalah, menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang memuat skala prioritas.

Sejak pertama kali dilantik, DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 diakui telah banyak menginisiasi raperda. "Kami memang aktif dalam turut serta mengusulkan raperda dan hampir 70 persen tersahkan," ujar Eryati.

Sementara di tahun 2024, DPRD Kabupaten Cirebon juga telah menyetujui 18 raperda dalam propemperda 2024. Eryati menjelaskan, dari total 18, hanya 5 raperda yang belum disahkan.

"Sebelumnya DPRD telah menyetujui 17 raperda yang akan digarap pada tahun ini tapi menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024, satu raperda tambahan disetujui menjadi 18.

Kita targetkan 5 raperda ini akan segera diparipurnakan," tuturnya.

Menjelangan berakhirnya jabatan anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024, b a n y a k

sekali momen yang berkesan bagi Eryati.

Perempuan yang kembali terpilih pada Pileg 2024 ini menggambarkan bila memimpin salah satu instrumen penting DPRD sama sekali bukan perkara mudah. Apalagi ketika bicara soal Bapemperda, dimana dirinya harus jeli ketika menyusun setiap rancangan Propemperda agar selaras dengan skala prioritas pembangunan daerah.

"Bagi saya pribadi, memastikan semua berjalan raperda sesuai track tentu membuat kesan tersendiri," tuturnya.

Selama memimpin Bapemperda ini, Eryati dinilai berhasil karena mampu memastikan tercapainya payung hukum yang menjadi penentu roda pemerintahan berjalan. Salah satu kuncinya, kata Eryati, adalah harmonisasi. Melalui itu, segala kepentingan dan kebutuhan menjadi titik temu. Meski demikian ia mengakui beberapa raperda yang tidak tercapai sesuai target karena kendala teknis.

"Model yang saya kedepankan di Bapemperda adalah harmonisasi. Dan itu menjadi kunci raperda yang kita sahkan berkualitas. Semoga periode kedepan semakin lebih baik dari hari ini," tandas perempuan yang berhasil meraup 12 ribu suara di Dapil 1 Cirebon ini. •Mir

Sekwan Asep Pamungkas: Kami Puas Berkolaborasi

Melalui program BK Award, Asep berharap akan ada peningkatan kinerja di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon pada periode mendatang.

Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon Asep Pamungkas menilai, kinerja anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 telah berhasil membawa perubahan bagi iklim pemerintah daerah. Meski tidak merata, namun target dan capaian untuk menyelesaikan raperda diakui meningkat.

"Sekarang 65 persen dari total raperda sudah disahkan. Tinggal sisanya semoga sebelum berakhir masa jabatan bisa kita selesaikan," ujarnya.

Orang nomor satu di sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon ini berharap, anggota DPRD pada periode mendatang akan semakin lebih baik dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya dalam partisipasi rapat dan penyusunan rancangan perda.

"Mudah-mudahan harapan

saya bapak ibu anggota dewan yang terhormat periode ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Artinya yang dijadikan beban kepada mereka dapat tertarget sesuai waktu. Sehingga saat peralihan nanti tinggal dilanjutkan," tuturnya.

Ia pun mencanangkan pada periode kedepan, akan berkolaborasi dengan pimpinan dewan untuk membuat satu program bernama Badan Kehormatan (BK) award. Melalui program itu, diharapkan akan ada perbaikan kinerja bagi seluruh anggota dewan.

"Bagi yang punya kinerja baik akan ada reward sementara yang

kurang akan dievaluasi supaya kinerjanya lebih baik lagi," jelasnya.

Selama berkarir menjadi fasilitator legislatif ini, Asep mengaku mendapat banyak teman dan saudara baru. Baginya ini adalah ruang yang menarik.

"Saya selalu menyukai dimanapun saya ditempatkan apalagi di sini para anggota dewan menerima saya dengan baik, sehingga saya senang banyak saudara, sahabat, dan teman. Dan bagi saya ini adalah pengalaman menarik," jelas pria yang pernah menjadi penyuluh pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon ini.

Bagi Asep, institusi DPRD merupakan ruang kerja yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ia pun banyak belajar dan menimba ilmu dalam ruang politik. "Kan sebagai orang eksekutif segmen ini tidak pernah sama sekali saya pikirkan. Tapi setelah tahu, ternyata asyik jika bisa kenal dengan para wakil rakyat ini," pungkasnya. •Suf



Kabag Umum dan Kepegawaian Wawan Siswandar: Berharap Sinergi Kedepan Lebih Baik

Wawan berharap, para anggota DPRD baru akan terus bersinergi dengan baik, sehingga tidak ada permasalahan dalam penggunaan anggaran.

Menjabat kepala bagian umum dan keuangan bukanlah pekerjaan yang mudah bagi Wawan. Selain harus siap sedia dalam kondisi apapun memenuhi kebutuhan legislator, juga memastikan pertanggungjawaban setiap alur keuangan. “Karena secara tidak langsung, kami lah yang bertanggungjawab untuk pelaporan penggunaan anggaran di sini,” ujarnya.

Sudah hampir 5 tahun, pemilik nama lengkap Wawan Siswandar ini dipercaya menjadi pengelola keuangan DPRD Kabupaten Cirebon. Ia mengaku merasa senang selama memfasilitasi anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024.

“Yang saya rasakan ketika awal tahun, kondisi kesekretariatan seperti berantakan. Karena belum ada sinergitas dengan para anggota dewan. Tetapi saat masuk tahun ke 3 dan 4 mereka sudah bisa memahami aturan yang ada di kantor. Dan mereka bisa bersinergi dengan baik,” ungkap Wawan.

Meski ada saja perbedaan dalam penafsiran aturan, namun secara keseluruhan para legislator periode saat ini mampu bekerjasama dengan baik.

Ia pun mengapresiasi kinerja DPRD Kabupaten Cirebon yang

dinilai optimal dalam mengemban amanah. Terutama dalam menyelesaikan target rancangan peraturan daerah (raperda).

Pria yang gemar bertani itu mengaku banyak sekali ilmu dan pengalaman selama bekerja di sekretariat DPRD. “Di awal anggota DPRD dilantik, saya belajar banyak untuk mengenal karakter seluruh 50 anggota dewan.

Dan baiknya mereka semua mau menerima masukan dari saya,” jelasnya.

Dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Cirebon 2019-2024, ia pun bersiap menyambut para legislator baru yang terpilih. Laki-laki yang dikenal selalu menyempatkan untuk membaca al-Quran ini berharap, para anggota DPRD baru dapat terus bersinergi dengan baik. Sehingga tidak ada masalah terutama dalam penggunaan anggaran.

“Kalau di daerah lain masih banyak yang *trouble* penggunaan anggaran. Alhamdulillah di sini tidak terjadi begitu. Semoga saja periode selanjutnya kinerja dan semangatnya akan lebih baik lagi,” tandasnya. •Ryn



Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Isnaeni Jazilah: Periode Baru, Semoga Raperda Baru

Isnaeni menilai, kinerja anggota DPRD periode ini telah optimal dalam menghasilkan produk hukum daerah.

Jabatan sebagai fasilitator untuk merumuskan peraturan daerah adalah hal baru bagi Isnaeni. Apalagi di ruang politik dan legislatif. “Ya ini yang unik dan membedakan dari jabatan saya sebelumnya,” ujar pemilik nama lengkap Isnaeni Jazilah.

Isnaeni saat ini dipercaya menjadi Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Ia pun terlibat dalam perumusan dan penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) bersama DPRD.

Bagi Isnaeni, di sinilah ia banyak belajar dan memperkaya pengetahuan sekaligus menempa pengalaman. Perbedaan latarbelakang yang variatif dari seluruh anggota dewan, membuat ia harus mampu berkolaborasi dan kompromistis.

“Pokoknya di sini benar-benar belajar dan mendengar. *Treatment* nya beda gitu. Dan di sini saya banyak belajar langsung dengan para wakil rakyat, bagaimana mereka mengupayakan aspirasi konstituennya dengan caranya masing-masing,” ungkap perempuan alumnus Universitas Diponegoro ini.

Tak sedikit, ia menemui anggota dewan yang berpikiran brilian dan *out off the box* saat

menyampaikan gagasan dalam rapat dengar pendapat. Selama kebersamaan itu, Isnaeni merasakan pengalaman menyelesaikan masalah terutama berkaitan penyusunan legislasi.

Saat masih di organisasi perangkat daerah (OPD), Isnaeni dikenal sosok yang sering berbagi pemahaman mengenai hukum dan aturan apapun. Namun saat di DPRD, Isnaeni harus berkolaborasi dengan tetap menjaga etika agar tak menggurui.

Ia pun menilai, kinerja 50 anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024 secara keseluruhan telah optimal.

“Apalagi mereka itu orang-orang yang punya banyak pengaruh di masyarakat. Mereka memiliki integritas dan kemampuan yang baik, sehingga setiap keputusan dan kebijakan legislator tentu atas dasar pertimbangan,” ujarnya.

Isnaeni berharap, anggota DPRD periode mendatang, akan sama-sama memiliki komitmen terhadap tugasnya terutama dalam menghasilkan produk legislasi.

“Semoga pas peralihan nanti, tidak ada PR yang belum selesai. Artinya periode baru, raperda juga baru. Biar bisa fokus dan tentu selalu bersinergi dengan kami,” kata Isnaeni. •Suf.



Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Agung Gumilang: Ini Tugas Unik

Agung tak banyak komentar saat ditanya sejauh mana pengalamannya bekerjasama dengan DPRD. Baginya ini adalah pengalaman unik. Bagaimana kesannya?

Baginya, fungsi DPRD sangat strategis karena memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon. Karenanya, selama kebersamaan anggota DPRD, Agung banyak belajar hal baru.

“Sesuatu yang semula belum pernah saya dapatkan, saya banyak belajar mendengarkan segala persoalan masyarakat. Dan saya bertugas memfasilitasi teman-teman anggota DPRD agar mereka bisa lancar melaksanakan tri fungsinya,” ungkap pria yang saat ini menjabat Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, pemilik nama lengkap Agung Gumilang ini selalu selalu siap bila diminta memfasilitasi anggota DPRD. Misalnya dalam rapat dinas, konsultasi hukum berupa kunjungan dalam dan luar daerah, LKPJ hingga rapat Badan Anggaran (Banggar).

“Kita ingin memastikan Pemda itu di fasilitasi oleh teman-teman DPRD, sehingga belanja dengan kebutuhan rencana pembangunan bisa *balance*,” jelasnya.

Menurutnya, anggaran belanja yang berkualitas bisa terjadi bila fungsi pengawasan optimal sehingga serapannya tepat sasaran.

Ia mengaku terus bersinergi

baik dengan anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024. Meski secara administratif, ia berada di bawah Sekretaris Dewan dan Bupati Cirebon, tetapi dalam tupoksinya, Agung juga bertanggungjawab kepada anggota dewan.

Bagi pria yang pernah berdinastasi di Bappeda itu, pengalaman bekerja di sekretariat dewan sangatlah berkesan meski jabatannya baru seumur jagung. Namun itu adalah tugas yang unik. Mengapa? Karena bila sebelumnya Agung hanya memiliki satu pimpinan, sekarang berada di bawah dua pimpinan.

“Satu pimpinan birokrasi, satu pimpinan politisi. Jadi harus pintar-pintar melaksanakan tugas ini agar tetap berjalan,” ujarnya.

Dengan karakteristik dan latarbelakang yang heterogen ini, ia harus bisa menyelami lebih banyak kebiasaan dan karakter orang. Ia pun berharap, anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode baru nanti dapat terus

bekerjasama dengan baik. Ada banyak pekerjaan rumah yang menanti.

“Cirebon punya potensi yang luar biasa. Intinya gimana caranya Cirebon Kabupaten Sejahtera. Dan itu harus didipastikan mesin birokratnya bagus dan para politisinya juga oke. Pada intinya kami siap bermitra,” tandasnya. •Suf



Kabag Humas dan Kerjasama Encus Suswaningsih: Banyak Pengalaman dan Pembelajaran

Encus menilai, anggota DPRD 2019-2024 saat ini telah bekerja dengan baik dan diharapkan terus meningkat di periode mendatang.

Bagi sosok perempuan satu ini, menjadi fasilitator anggota DPRD Kabupaten Cirebon merupakan pekerjaan yang memiliki seni tersendiri. “Iya karena kalau sebelum di sini, *user* tugas saya kan ke peternak dan petani, sekarang di sini *user*-nya bapak ibu anggota dewan,” ujarnya terkekeh.

Pemilik nama lengkap drh Encus Suswaningsih memang belum lama menjabat sebagai Kabag Humas dan Kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Meski demikian, banyak pembelajaran dan pengalaman baru yang diperoleh. Dan itu menjadi tantangan baginya.

“Kalau dulu masih di dinas pertanian saya hanya menangani bidang peternakan dan pertanian saja, tetapi setelah di sini saya mendapat banyak ilmu baru. Bagaimana seluruh aspirasi masyarakat yang banyak itu dapat difasilitasi,” jelasnya.

Perempuan yang sempat berkuliah

kedokteran hewan ini merasa puas selama kebersamaan anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Meski belum lama menjabat, ia mengaku mendapat banyak pengalaman berharga. Encus memastikan, para ang-

gota DPRD Kabupaten Cirebon selama ini bekerja dengan baik. “Walaupun saya baru satu tahun dua bulan, saya mengamati kinerja mereka sangat bagus, tapi kita berharap kedepan terus ditingkatkan,” ujarnya.

Tolok ukur kinerja tersebut, kata Encus, dapat terlihat dari kehadiran rapat yang selalu memenuhi kuorum dan target raperda.

“Meski sekilas, tapi menurut saya sudah baik dan mudahan semakin di tingkatkan lagi, karena kan pasti namanya kinerja ada kekurangan dan kelebihan,” kata dia.

Dengan kinerja yang sekarang, Encus berharap bisa mendorong tercapainya target pembangunan yang sudah diprioritaskan oleh pemerintah daerah.

Encus menyampaikan, DPRD memiliki target 17 raperda. Ia pun berharap, sebelum masa jabatan berakhir, seluruh raperda tersebut bisa maksimal diparipurnakan.

•Suf



Bebas Banjir, Sampah dan Jalan Berlubang

Belum lama saya mengunjungi rumah salah satu warga di Waled yang tergenang banjir kiriman Sungai Cisanggarung. “Kang iki ari udan gedekuh, wilayah Cirebon banjir maning banjir maning, priben kih? Pegel kang, ari wis meken,” ujar warga.

Saya tentu tak bisa menjawab banyak. Memang ini adalah tahun kelima saya mengunjungi wilayah banjir. Hampir tiap tahun, banjir di Kabupaten Cirebon tak pernah absen. Tahun ini semakin parah, karena ada sembilan kecamatan yang terendam banjir kiriman.

“Ari wis mengkenen bae, terus solusine apa kang?” Pertanyaan itu, sebenarnya mewakili banyak keluhan yang sering saya dengar. Saya jawab dengan sedikit menjelaskan, solusi pertama: normalisasi sungai.

Kalau kita lihat, kondisi sungai di Kabupaten Cirebon sangat memprihatinkan. Di hulu, lebar sungai 40 meter, di hilir, lebarnya pun sama. Tapi saat di tengah, memasuki pemukiman dan pedesaan, lebar sungai menjadi 7 meter. Berkurang setengahnya, akibatnya *bottleneck*: air keluar dan menerjang pemukiman.

Maka inilah pentingnya memiliki backhoe apung yang selalu *standby* di tiap sungai utama untuk pengerukan. Pemerintah daerah bisa melakukan lobi anggaran untuk pengadaan backhoe apung.

Kedua, perlunya membuat embung-embung di beberapa titik rawan banjir seperti Waled dan Gunungjati. Embung ini selain berguna menampung air hujan, juga bisa dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian saat kemarau tiba. Khusus di Sungai Condong, penting membuat sodetan guna mengurangi debit banjir.

Ketiga, perbaikan drainase secara menyeluruh. Ini juga berguna untuk mencegah kerusakan jalan atau lubang-lubang jalan saat musim hujan tiba.

Saya pernah membaca komentar warganet di so-

sial media. “Lamon wis manjing dalam rusak lan bolong-bolong, berarti wis manjing Cirebon,” tulisnya dalam kolom komentar sosial media. Saya tak membantah.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, ruas jalan dengan kondisi rusak ringan pada 2023 sepanjang 338,78 kilometer, rusak sedang 99,12 kilometer, dan 92,35 kilometer mengalami rusak berat.

Selain drainase, perbaikan jalan juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Lagi-lagi kemampuan lobi tim anggaran Kabupaten Cirebon kurang maksimal, jika dibandingkan dengan Kabupaten Kuningan yang setiap tahun mendapatkan bantuan keuangan lebih dari Rp 300 miliar untuk infrastruktur.

Bagaimana dengan sampah? Sampah juga menjadi penyebab mengapa sungai-sungai cepet tersedimentasi.

Belum lagi bila melihat sampah yang berserakan di jalan karena tak tersedianya TPS. Pemandangan ini semakin menegasikan Cirebon ‘darurat sampah’.

Pentingnya pengelolaan sampah di tiap desa dengan menyediakan TPS harus segera dilakukan. Selain itu, optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kubangdeleg dengan memperbaiki sarana jalan. Terakhir penambahan dan peningkatan armada angkut sampah. Bila perlu, bisa dengan menggandeng pihak swasta untuk menyewakan armada.

Inilah pentingnya menyiapkan segala rencana pembangunan Kabupaten Cirebon yang berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.

Pemerintah daerah harus mampu melakukan lobi ke pemerintah provinsi dan pusat untuk memberikan bantuan keuangan. Sehingga bila ditanya kenapa jalan tak segera diperbaiki? Tak lagi menjawab: *langka anggarane*.

Bila semua itu telah dilakukan, bukan tak mungkin harapan Kabupaten Cirebon *no* banjir, sampah dan jalan berlubang segera terwujud.

Pendidikan Dasar dan Vokasi

Saya sempat bertanya pada diri sendiri, sebenarnya, butuh berapa tahun untuk melihat perubahan sebuah daerah. Tiga atau empat tahun? Atau hingga akhir jabatan kepala daerah?

Di tahun pertama, saya ingat bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Cirebon masih berada di angka 6.92: setara kelas 6 sekolah dasar (SD).

Sementara di tahun 2023 angkanya sedikit naik menjadi 7,64 poin: setara kelas 1 SMP, atau kira-kira hampir kelas dua SMP. Ini menjadi tantangan yang harus segera kita kejar bersama karena masih tingginya angka putus sekolah.

Pemerintah daerah harus memastikan jumlah sekolah di Kabupaten Cirebon seimbang. Ada disparitas jumlah sekolah. Sebut saja jumlah sekolah dasar (SD) sederajat yang saat ini berjumlah 855; sementara jumlah SMP hanya 215; SMA 53 dan SMK 109 (*data BPS*).

Terdapat *blank spot* di beberapa kecamatan. Sebut saja di Kecamatan Jamblang memiliki terdapat 21 SD, namun hanya memiliki 2 SMP dan 2 SMA. Tak kalah memprihatinkannya, Kecamatan Kedawung dan Depok bahkan belum memiliki SMA negeri.

Untuk memenuhi target pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Cirebon, harus dipastikan ketersediaan jumlah kelas yang ada di masing-masing jenjang. Jangan sampai angka putus sekolah dikarenakan daya tampung yang tidak memadai pada jenjang berikutnya.

Selain membangun ruang kelas dan sekolah baru, tentu saja harus dicarikan alternatif lain. Salah satunya dengan mengatur jam sekolah (sekolah sore) atau hari sekolah (sekolah akhir pekan). Juga bisa memberikan kemudahan bagi swasta yang ingin mendirikan sekolah, terutama di daerah *blankspot*.

Sementara bagi yang putus sekolah, kita harus jemput bola. Pastikan mereka tetap dapat mengenyam pendidikan, misalnya melalui PKBM atau program kejar paket di setiap desa. Pemerintah Desa harus

proaktif jika ada warganya yang putus sekolah.

Kedua, kita harus pastikan pendidikan vokasi yang berkualitas. Pendidikan vokasi di sekolah-sekolah kejuaraan atau balai latihan kerja harus benar-benar mencetak SDM yang terampil dan siap kerja.

Pemerintah daerah harus bisa memfasilitasi antara sekolah dan industri untuk berkomunikasi dan bekerjasama. Ini penting agar *interlink* atau *link and match* antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia kerja terjalin.

Pendidikan vokasi baik SMK-SMK atau lembaga pelatihan keterampilan di Kabupaten Cirebon harus ‘menikah’ dengan industri dan dunia kerja. Terlebih, saat ini kita menyambut kawasan industri wilayah timur Cirebon.

Selain soal ketersediaan ruang kelas, masalah kompleks pendidikan dasar lainnya juga harus segera diurai. Antara lain banyak gedung dan meja/kursi yang rusak, kekurangan buku perpustakaan, kekurangan guru, kesejahteraan guru, dan kualitas lulusan yang rendah.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: Peningkatan anggaran pendidikan dan alokasinya secara tepat; Pelatihan dan peningkatan kesejahteraan guru; Pengembangan kurikulum yang relevan dan adaptif sesuai kebutuhan lokal; Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan akses teknologi; Program kesehatan dan gizi yang terpadu dengan pendidikan; dan Mengatasi kesenjangan digital.

Untuk menyelesaikan itu semua, agar kebijakan yang dibuat pemerintah mengena perlu melibatkan para pemangku kepentingan, terutama murid, orang tua, dan komunitas dalam merumuskan sebuah kebijakan. Sehingga anggaran yang tersedia bukan hanya terserap tapi juga menyelesaikan masalah.

Kawasan Industri Terintegrasi

Tentu saja tak habis pikir, jika ada yang beranggapan bahwa memerangi pengangguran dan kemiskinan dengan BLT. Apalagi nilai BLT-nya tidak cukup untuk kebutuhan sebulan. Bahwa hal itu membantu, itu iya. Namun, tidak menyelesaikan masalah.

Itu adalah selemah-lemahnya usaha. Kewajiban pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja, di berbagai bidang, baik kelautan, pertanian, pariwisata, maupun industri.

Lihatlah beberapa daerah yang serius membangun pariwisata dan kawasan industri melesat keluar dari kemiskinan. Sumbangsih terhadap PDRB sangatlah besar. Sebut saja Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Kendal.

Kawasan industri di Bekasi merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dengan luas sekitar 5.600 hektar. Menampung lebih 1.500 perusahaan dari 30 negara. Sektor industri yang ada di sini meliputi otomotif, elektronik, kimia, logistik, dan makanan.

Dilengkapi dengan fasilitas standar internasional: pembangkit listrik, pengolahan air, jaringan listrik, layanan keamanan 24 jam dan sistem telekomunikasi yang canggih.

Tak heran kawasan industri Bekasi ini menyumbang 77,46 % (Rp 393 triliun) dari total PDRB. Bahkan ranking pertama penyumbang PDRB Jawa Barat. Sungguh angka yang fantastis.

Sementara di Kabupaten Purwakarta, sumbangsih kawasan industri terhadap PDRB yakni 58,34 % (Rp 76,48 triliun); Kabupaten Karawang 71 % (Rp 268 triliun). Sedangkan, Kawasan Industri Kendal menyumbang 41,86 % dari PDRB.

Bagaimana dengan Kabupaten Cirebon? Harus diakui sumbangsih sektor industri terhadap PDRB kita baru mencapai 20% (Rp 12,4 triliun). Kita masih tertinggal jauh dengan kabupaten lain.

Selain itu industri sangat membantu menggerakkan

ekonomi dan uang berputar di masyarakat. Sebagai ilustrasi satu pabrik sepatu yang memiliki 20 ribu karyawan dengan UMR Rp 2,4 jt. Dalam sebulan, uang yang berputar melalui gaji kurang lebih Rp 48 miliar.

Itu baru satu pabrik, bagaimana bila itu puluhan sampai ratusan pabrik? Maka kawasan industri harus dibuat segera sebagai bentuk fasilitasi Pemda mendorong tumbuhnya industri dan pabrikasi di Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah harus memiliki visi yang jelas dalam memberantas kemiskinan dan pengangguran.

Industri harus segera dibuat kawasan, agar tidak tumbuh liar di sekitar jalan tol. Dengan keberadaan kawasan, dampak lingkungan, baik alam maupun sosial, lebih dapat diminimalisasi.

Dalam rang itu, pertama, kita harus memperkuat keberadaan kawasan industri di Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Perda RTRW harus mengatur dan mengintegrasikan kawasan industri dengan kawasan strategis lainnya.

Kedua, membuat rencana besar (grand design) kawasan industri. Misalnya, berencana membuat akses ke kawasan secara terpadu baik darat, laut, maupun udara.

Jika daerah Losari, Pabedilan, dan Pangenan dipilih sebagai kawasan industri, maka menarik jika membuat jalan poros industri yang menghubungkan tiga moda transportasi. Dari pintu tol Ciledug dibuat jalan yang menghubungkan *dry port* (di sekitar Stasiun KA Losari) hingga ke pelabuhan baru di Losari.

Dari Stasiun KA Losari ke depan harus mempunyai koneksi ke bandara Kertajati. Dari Stasiun Jatibarang perlu dibangun rel menuju Kertajati. Sehingga kawasan Cirebon, Indramayu, Brebes dan Tegal mudah mengakses Kertajati.

Selain, industri, konektivitas ini juga akan sangat berdampak pada pariwisata dan perdagangan. Jika ini terjadi, PDRB Kabupaten Cirebon di atas Rp 100 triliun bukanlah mimpi. Pun demikian dengan kemiskinan dan pengangguran di bawah 5%.

Kawasan Strategis Pariwisata

Destinasi wisata harus bisa menarik pelancong dan membuat *ragih*. Rasa wisata harus hadir di setiap destinasi, dan membangun hubungan emosional dengan pengunjung. Cirebon punya potensi destinasi yang beragam, dan setiap hari ribuan wisatawan berkunjung. Namun, pariwisata Kabupaten Cirebon masih dianggap jalan di tempat.

Sebelumnya, mari kita lihat permasalahan yang dihadapi pariwisata Kabupaten Cirebon. **Pertama**, infrastruktur belum memadai. Akses jalan menuju beberapa objek wisata masih belum bagus. Hal ini membuat wisatawan kesulitan mencapai destinasi.

Fasilitas umum, seperti toilet, tempat parkir, dan tempat sampah, di beberapa objek wisata masih kurang lengkap. Penginapan dan restoran yang tersedia belum memadai untuk menampung jumlah wisatawan yang terus meningkat.

Kedua, promosi belum maksimal. Banyak wisatawan yang belum mengetahui destinasi menarik yang ada di Kabupaten Cirebon. Seperti situs Plangon, banyak dikunjungi wisatawan luar daerah, tanpa promosi dan infrastruktur seadanya.

Ketiga, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat. Hal ini menyebabkan pengelolaan dan promosi wisata tidak terarah dan tidak efektif.

Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) belum memadai. Pelaku usaha pariwisata banyak yang belum mengikuti pelatihan tentang bagaimana melayani wisatawan dengan baik. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di kawasan wisata masih kurang. Juga perlu regenerasi SDM di sektor wisata budaya.

Kelima, daya saing dan kreativitas. Perlu upaya kreatif untuk mendongkrak destinasi yang ada agar memiliki daya saing yang kuat dibanding kabupaten lain. Juga perlu dibangun interkoneksi antar destina-

si di kabupaten Cirebon.

Kelima permasalahan itu harus segera dijawab dan diselesaikan. Salah satunya dengan membangun **Kawasan Strategis Pariwisata (KSP)**. Kawasan ini harus mampu mengintegrasikan potensi wisata religi Gunung Jati dan Kawasan Batik Trusmi.

KSP harus mampu memaksimalkan potensi kunjungan sekitar 2.500 wisatawan per hari ke Gunung Jati. Untuk itu KSP yang dibangun pertama berupa jalan poros wisata yang menghubungkan Gunung Jati dengan Trusmi. Jalan ini kurang lebih sepanjang tujuh kilometer.

Gunung Jati-Trusmi ini dijadikan KSP. Sepanjang jalan poros itu harus dibangun pusat kuliner, pusat pentas seni dan budaya, wahana wisata permainan, pusat oleh-oleh, penginapan/hotel, dan pendukung pariwisata lainnya.

Akses menuju KSP juga harus ditingkatkan. Selain dari pintu tol terdekat (pintu tol Plumbon) juga perlu dibangun infrastruktur jalan yang memanfaatkan jalur kereta api. KSP ini berdekatan dengan Stasiun KA Cangkring.

Untuk itu harus ada infrastruktur yang mempermudah wisatawan mengakses KSP dari stasiun. Selain membangun jalan, perlu juga disiapkan bus gratis pariwisata yang mengantarkan wisatawan dari stasiun menuju KSP dan sebaliknya.

Dari KSP juga perlu dibangun interkoneksi dengan destinasi lainnya, seperti wisata alam di kawasan Palimanan, Plangon, pantai Losari, dan destinasi wisata religi/budaya lainnya.

Jika mengacu pada Raperda Ripparda, terdapat sembilan KSP. Namun tentu saja sembilan KSP ini masih dikaji untuk ditetapkan menjadi Perda. Beberapa pun nanti KSP yang ditetapkan, pemimpin ke depan harus mampu membangun interkoneksi ke sembilan KSP tersebut. Tentu saja, rasa wisata harus tetap menjadi ruh destinasi.

Pertanian Berteknologi Maju

Betul bahwa Kabupaten Cirebon sudah mampu swasembada beras. Namun, itu saja tidak cukup untuk memerangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Pertanian harus menjadi salah satu ujung tombak perang melawan kefakiran.

Dalam rangka itu perlu kita petakan dulu permasalahan pertanian yang ada di Kabupaten Cirebon. Setidaknya ada **tujuh** permasalahan yang perlu segera diurai agar swasembada beras bisa dipertahankan, plus dapat memerangi kemiskinan.

Pertama, bencana banjir dan kekeringan. Pada Februari 2023 banjir mengakibatkan sekitar 3.074 hektar sawah gagal tanam. Sementara pada musim kemarau lahan pertanian sering kekeringan. Tentu saja keduanya berpengaruh pada produksi pertanian.

Untuk itu perlu ada upaya makro yang komprehensif untuk menanggulangi banjir pada saat penghujan dan kekeringan pada saat kemarau. Di satu sisi menyelesaikan ancaman bencana, namun di sisi yang lain juga menyelesaikan ancaman terhadap produksi pertanian.

Upaya yang patut dikaji lebih jauh adalah dengan membangun waduk, embung, atau setu di beberapa titik strategis. Fungsi waduk ini untuk menampung air saat penghujan sehingga mencegah banjir; dan menjadi cadangan air pada saat kemarau untuk dapat tetap mengairi pertanian.

Kedua, akses air. Infrastruktur irigasi terbatas. Selain dibutuhkan pembangunan irigasi baru, saluran irigasi lama juga sudah rusak. Ini yang menyebabkan petani kesulitan mengairi sawah terutama saat kemarau. Sering kita mendengar petani berkelahi gegara rebutan air.

Akses air pertanian juga di beberapa daerah terganggu dengan pencemaran limbah industri. Limbah ini tentu saja mengganggu Kesehatan dan ekosistem pertanian. Untuk itu perlu adanya pembangunan irigasi yang terintegrasi dengan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

Ketiga, kelangkaan pupuk. Petani kerap menemui kelangkaan pupuk di pasaran. Kalau pun ada biasanya dengan harga yang lebih mahal. Perlu adanya upaya pemerintah daerah yang menjalin kerja sama dengan produsen pupuk agar ketersediaan pupuk terjaga.

Bila diperlukan dan menguntungkan secara bisnis, bisa membuat pabrik pupuk baru di kawasan

industri yang akan dibangun di Cirebon. Alternatif lainnya adalah memberdayakan petani untuk mulai mengombinasikan penggunaan pupuk organik.

Keempat, regenerasi petani. Kebanyakan generasi muda kurang berminat untuk menggeluti pertanian sebagai pilihan pekerjaan. Faktor upah rendah dan anggapan sebagai pekerja kasar membuat mereka enggan.

Untuk itu pemerintah perlu membuat program yang melibatkan generasi muda untuk aktif dalam membangun pertanian dan industri pertanian. Program petani milenial adalah salah satu contoh yang patut untuk dikembangkan.

Saatnya generasi muda dengan segala inovasinya meningkatkan produksi pertanian. Sehingga pertanian adalah bidang yang menjanjikan secara bisnis. Dengan inovasi dan penerapan teknologi, pertanian bukan lagi pekerjaan kasar.

Kelima, Keterbatasan modal dan teknologi. Kebanyakan petani di Cirebon adalah petani kecil dengan modal terbatas, dan generasi tua dengan pengetahuan terbatas. Padahal di beberapa negara yang mempunyai produktivitas pertanian tinggi justru mengedepankan teknologi.

Penerapan teknologi, regenerasi pertanian, dan akses permodalan harus menjadi program yang terintegrasi. Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan reformasi agraria menuju pertanian yang lebih produktif dan menarik secara ekonomi.

Keenam, tata niaga dan akses pasar. Petani sering mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panen dengan harga yang wajar. Hal ini disebabkan oleh panjangnya rantai tata niaga, infrastruktur yang kurang memadai, dan ulah spekulasi yang memainkan harga di pasaran.

Dengan teknologi informasi, pemerintah daerah harus membuat sebuah sistem yang membuka akses pasar. Sekaligus juga sistem yang dapat memetakan hasil produksi pertanian per komoditas per daerah. Ini penting untuk membuat alur tata niaga agar hasil pertanian mudah terserap dengan harga yang kompetitif.

Ketujuh, alih fungsi lahan. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, dan komersial marak terjadi. Lahan pertanian produktif menjadi menyusut. Untuk itu peran pemerintah daerah dalam menegakkan Perda RTRW harus optimal dan disiplin. Tidak boleh memberikan izin pengolahan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap

Pernahkah mendengar kisah kejayaan Muara Djati Cirebon? Sebuah nama yang disematkan untuk pelabuhan kapal-kapal besar sekaligus simpul perdagangan Nusantara dan pelayaran antarbangsa.

Sungguh takjub, bila mendengar cerita Muara Djati. Ya, kita sempat memiliki pelabuhan yang menjadi salah satu simpul penting dalam lalu lintas perdagangan antar-negeri. Laut menjadi beranda depan Cirebon.

Namun coba kita lihat hari ini. Masihkah kita memiliki pelabuhan yang dapat menampung kapal besar? Seberapa besar kapal-kapal nelayan kita? Berapa pendapatan para nelayan dalam sehari? Berapa kilo ikan yang mampu mereka tangkap dalam sekali berlayar? Dimana mereka menjualnya? Bagaimana hidupnya hari ini?

Kondisi kelautan kita cukup memprihatinkan. Sebut saja dalam ruang perikanan tangkap, yang kalah jauh dibanding kabupaten tetangga, Indramayu. Retribusi dari 7 tempat pelelangan ikan (TPI) hanya mampu menyumbang Rp 100 – Rp 150 juta untuk PAD Kabupaten Cirebon.

Mengapa? Karena kita tak memiliki kapal besar dan alat tangkap seadanya. Kemampuan kapal nelayan kita hanya berukuran 20 sampai 30 GT. Tak heran kemampuan produksi kita hanya 10 ribu ton per tahun.

Maka menjadi penting kita harus memiliki kapal berukuran 200-300 GT agar produksi hasil laut kita meningkat. Mahal, tentu saja, namanya juga kapal besar. Namun, bukan berarti tidak mungkin memiliki bukan? Karangsong adalah contohnya, nelayan sudah terbiasa melabuhkan kapal 200-300GT.

Jika APBD dirasa berat untuk membelinya, maka kita masih punya pemerintah provinsi dan pusat. Lagi-lagi, pendekatan dan kejelasan program harus mampu meyakinkan pemerintah pusat atau provinsi.

Selain kapal kapasitas besar tentu saja harus

diimbangi dengan akses masuk kapal. Jika pantai dan sungai dangkal maka kapal-kapal besar akan kesulitan bersandar. Normalisasi muara dan pelabuhan harus dilakukan.

Masalah lainnya, para nelayan hari ini, mengandalkan hutang pada tengkulak untuk berlayar. Sehingga terpaksa menjual hasil tangkapannya pada tengkulak, ketimbang melalui TPI. Tentu dengan harga yang lebih murah.

Hal yang paling penting dan mendasar, bagaimana pemerintah daerah bisa menguatkan, memperbesar sekaligus meningkatkan produktivitas perikanan tangkap seperti Indramayu. Kita harus siapkan ekosistem kelautan yang bisa memastikan itu terjadi.

Siapkan industri pengolahan perikanan tangkap berikut dengan akses kemudahan permodalan. Misalnya dengan memastikan koperasi khusus nelayan dan memfasilitasi penjualan. Pemerintah daerah harus mampu membangun relasi dengan para eksportir industri perikanan baik nasional dan internasional.

Industri pengolahan perikanan tangkap ini harus terintegrasi dengan rencana pembuatan kawasan industri. Artinya kawasan industri yang dibangun harus mampu memaksimalkan pengolahan ikan hasil laut. Begitupun dengan pembangunan fasilitas perikanan tangkap harus disesuaikan dengan rencana pembuatan kawasan industri.

Laut di Kabupaten Cirebon memiliki potensi yang luar biasa sehingga harus dijadikan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau produksi perikanan kita meningkat, pasti pendapatan masyarakat juga meningkat.

Luas wilayah laut harus dieksplorasi untuk ke-maslahatan, perbaikan dan peningkatan hidup masyarakat Kabupaten Cirebon. Pada akhirnya, kita tidak boleh lagi miskin di tengah laut yang kaya.

Ekosistem Transportasi Publik

Angkot ngetem sembarangan, bikin macet dan semrawut jalan. Jika jalan, ugal-ugalan, tak nyaman, dan jaminan keamanan yang rendah. Di Cirebon masa depan, hal itu tak boleh terjadi. Kisah itu harus sekadar menjadi cerita, tak ada lagi di dunia nyata.

Ngimpi? Tidak. Itu visi Cirebon ke depan yang harus diwujudkan. Sulit? Tentu saja bagi yang tidak mau berusaha. Yakinlah itu bisa diwujudkan. Banyak daerah lain yang sudah mewujudkan kok.

Kuncinya adalah bagaimana membangun ekosistem transportasi yang baik. Ekosistem yang mampu mengintegrasikan segala potensi dan segala moda transportasi yang ada. Mari berkaca pada Jakarta, kemudian memikirkan mungkinkah hal itu diterapkan di Cirebon.

Jakarta memiliki transportasi umum *commuter line* (KRL) yang diselenggarakan PT. KAI. Kemudian pemerintah daerah menggagas transjakarta dan jaklingko. Bahwa kemudian itu MRT dan LRT itu hal lain. Commuter line, transjakarta, dan jaklingko, lebih memungkinkan untuk diterapkan di Cirebon.

Mari kita memahami dulu tentang transportasi komuter. Komuter adalah seseorang yang bepergian ke suatu tempat untuk beraktivitas (bekerja, berdagang, sekolah) dan kembali ke tempat tinggalnya setiap hari (bepergian bukan untuk tinggal permanen di daerah tujuan).

Nah, *commuter line* PT KAI selain di Jakarta juga diterapkan di Yogyakarta-Palur, Prambanan, Merak, Bandung, Surabaya, dan Bandara Soekarno-Hatta. Artinya hal serupa juga bisa dibuat untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya: Tegal-Brebes-Cirebon-Indramayu (TBCI). *Commuter line* ini akan lebih menarik jika tersambung dengan bandara Kertajati via Stasiun Jatibarang.

Di wilayah Kabupaten Cirebon saja kini sudah ada 11 stasiun, yang merupakan pertemuan dua jal-

ur besar KA, utara dan selatan. Stasiun tersebut adalah Kaliwedi (no aktif), Arjawinangun, Bangoduwa, Cangkring, Waruduwur, Babakan, Losari, Luwung, Sindanglaut, Karangsuwung (non-aktif), dan Ciledug.

Jika *comuter line* diselenggarakan, dua stasiun yang non aktif bisa diaktifkan Kembali, bahkan jumlah stasiun bisa ditambah. Tugas pemerintah daerah kemudian membuat transportasi umum berbasis bus seperti transjakarta, sebut saja transcirebon.

Transcirebon inilah yang membangun konektivitas dari satu titik ke titik lain dengan stasiun KA. Konektivitas yang harus dibangun adalah dari wilayah utara ke selatan (dari Kapetakan ke Sumber, Dukupuntang dan Greged). Jika ini terselenggara maka jalur timur-barat melalui *commuter line*, dan utara-selatan via transcirebon.

Berikutnya adalah memperbanyak angkutan pengumpan dari pelosok Cirebon ke titik transcirebon dan KRL. Caranya? Persis seperti jaklingko, memanfaatkan angkot yang sudah ada terintegrasi dengan KRL dan transcirebon.

Dengan pola pengelolaan angkot model jaklingko, seharusnya tidak ada lagi kisah angkot ngetem sembarangan, ugal-ugalan, dan membuat kemacetan. Peralnya kebutuhan dasar pengusaha dan sopir untuk memperoleh keuntungan terpenuhi, dengan pola hibrid: pembayaran dari masyarakat dan subsidi.

Nah, karena karakteristik komuter adalah mengatasi pergerakan orang secara harian, maka ekosistem transportasi ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kawasan strategis lainnya, terutama kawasan industri, ibukota sumber, dan kawasan pariwisata. Termasuk juga keberadaan pelabuhan dan bandara.

Jadi sederhananya, Cirebon ke depan memiliki kawasan industri, kawasan ibukota, kawasan perdagangan, dan kawasan strategis pariwisata, yang terkoneksi dengan baik dan nyaman oleh moda transportasi publik. Yuk, kita wujudkan.

Gedung Kesenian Penggerak Ekonomi

Cirebon sudah terlanjur terkenal memiliki kekayaan budaya dan seni. Begitulah memang lazimnya kota (kabupaten) tua, dan kawasan pesisir warisan kejayaan negeri maritim. Sayangnya, kekayaan seni budaya yang harusnya melahirkan kesejahteraan ini, justru kini perlahan menuju kepunahan.

Sering mendapat pertanyaan dari daerah lain, bagaimana Cirebon melestarikan budaya tersebut? Mereka beranggapan bahwa seni dan budaya Cirebon baik-baik saja. Sebaik nama besar Cirebon.

Jujur saya tidak bisa menjawab pertanyaan mereka secara gamblang. Saya belum melihat adanya upaya terintegrasi yang telah dan sedang diupayakan pemerintah untuk melambungkan kesenian Cirebon. Buktinya, dari 58 kesenian khas Cirebon, 30 di antaranya kini terancam punah.

Kesenian yang masih bertahan kebanyakan berjuang melestarikannya secara mandiri, ada sentuhan pemerintah tapi tak banyak. Saatnya mereka tak lagi sendiri kepedulian dan aksi nyata harus dibangkitkan.

Pembinaan dan kaderisasi seniman harus dilakukan dengan menghidupkan sentra-sentra seniman di setiap kecamatan. Pusat kreativitas ini akan membidani lahirnya generasi-generasi baru pelestari kesenian dan kebudayaan Cirebon.

Agar suguhan kesenian semakin menarik dan berdaya wisata, harus dibangun satu gedung kesenian terpadu di Kabupaten Cirebon. Gedung ini harus menjadi ikon kesenian Cirebon, sekaligus sebagai pemersatu para seniman dan pekerja seniman.

Gedung kesenian ini sedikitnya memiliki empat fungsi utama. Pertama, sebagai pusat pelatihan dan regenerasi kesenian Cirebon. Secara berkala di gedung ini akan digelar perlombaan dengan peserta para seniman muda yang lahir dari sentra-sentra kesenian di setiap kecamatan.

Perlombaan ini memiliki peran strategis untuk mendorong dan memotivasi para sanggar atau sentra

kesenian di setiap kecamatan untuk melahirkan generasi terbaik. Perlombaan juga menjadi wahana apresiasi bagi para pejuang pelestari budaya dan seni.

Kedua, gedung kesenian ini berfungsi sebagai pusat pertunjukan seni yang berkelas dan berteknologi canggih. Seni yang disuguhkan dengan baik dengan dukungan alat, tempat dan fasilitas yang memadai akan semakin bernilai tambah. Sebagai sebuah suguhan pertunjukan, ia akan semakin lezat dan berkelas.

Tentu saja itu akan menjadi daya tarik bagi penikmat seni, dan ujungnya menaikkan daya jual yang dapat mendongkrak kesejahteraan seniman. Sebagai pusat pertunjukan, gedung kesenian ini juga bisa untuk menggelar kegiatan seni dan budaya yang merupakan agenda resmi pemerintah.

Ketiga, gedung kesenian harus berfungsi sebagai bagian terintegrasi dari industri pariwisata di Kabupaten Cirebon. Agenda rutin pagelaran di gedung ini harus mampu menarik wisatawan, seperti halnya Pesta Kesenian Bali (PKB).

Bisa juga, pagelaran di gedung ini disesuaikan dengan paket wisata. Tentu saja, wisata religi, batik, kuliner, dan alam di Kabupaten Cirebon juga harus direvitalisasi dan dikembangkan.

Fungsi keempat, selain sebagai pusat seni pertunjukkan, gedung kesenian ini juga bisa menjadi etalase karya seni lainnya, seperti batik, lukisan kaca, rotan, dan gerabah. Para penikmat seni pertunjukan sekaligus juga dapat menikmati dan membeli karya seni khas Cirebon lainnya.

Dengan berjalannya empat fungsi tersebut, harapannya (ujungnyanya), gedung kesenian akan menjadi pusat penggerak ekonomi kreatif. Kesenian Cirebon tetap lestari, seniman sejahtera, Cirebon pun bahagia.

Selain itu, akan lebih menarik jika agenda event di Gedung Kesenian juga terintegrasi dengan kegiatan bidang lain, seperti event olahraga nasional maupun internasional.

Jalan Tol Pelayanan Administrasi

Kita masih terdapat dengan pencetakan layanan administrasi dasar, sementara pemerintah pusat sudah mulai mengenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ketertinggalan Kabupaten Cirebon apakah hanya pada persoalan alat perekam dan pencetak e-KTP saja?

Hingga 2023, terdaftar ada 33 kecamatan yang bisa menerima perekaman dan layanan e-KTP di tingkat kecamatan. Begitu pun sudah tersedia *prototype* layanan perekaman secara *mobile* (keliling) dengan menggunakan roda dua.

Secara sarana, jelas peralatan itu kurang jika mengacu pada jumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon yang mencapai 40. Begitu pun layanan *mobile* yang masih uji coba, unit masih terbatas.

Untuk tahap ini idealnya alat perekaman KTP tersedia di setiap kecamatan, minimal satu unit per kecamatan. Untuk kecamatan yang 'gemuk', atau berpenduduk banyak, bisa didukung dengan unit *mobile*.

Selain soal sarana ada beberapa hal lain yang juga tidak kalah penting. Pertama, mental aparat pemerintah yang belum sepenuhnya terinternalisasi tentang layanan prima. Alat tersedia, namun kadang ada saja oknum yang bermain mempersulit layanan.

Banyak warga yang mengeluhkan ketika membayar *uang pelicin*, baru upaya mereka mengurus administrasi kependudukan dipermudah. Jelas mental ini harus diberantas. Caranya bisa dengan pembinaan mental, bisa juga dengan penerapan sistem yang ketat.

Untuk penerapan sistem ini, diperlukan perangkat yang kedua, yakni data yang terpadu yang setiap saat *ter-update* di tingkat desa, yang kami beri nama *single data system* (SDS). SDS ini minimal merekam aktivitas kependudukan berupa pernikahan, kelahiran, kematian, pindah alamat, dan jenjang Pendidikan.

Dengan perekaman di tingkat desa tersebut, bahkan sistem itu memungkinkan untuk warga *update*

via ponselnya masing-masing, data akan tersedia dengan tingkat presisi yang bagus. Data ini akan memudahkan pemerintah memberikan layanan administrasi kependudukan. Bahkan, dalam waktu yang singkat bisa terlayani.

Sebagai contoh dengan data kelahiran, maka jauh-jauh hari, bahkan beberapa tahun sebelumnya, pemerintah sudah bisa memprediksi kebutuhan perekaman dan pencetakan KTP baru per desa di setiap bulannya. Dengan ini maka tidak alasan lagi mengenai blangko kosong, karena kebutuhan sudah diperkirakan jauh-jauh hari.

Sedangkan untuk kebutuhan kartu yang bersifat insidental, seperti KTP hilang atau rusak, pun bisa dilayani dengan cepat. Melalui aplikasi SDS warga tak perlu antri mengajukan permohonan, bisa dilakukan via ponsel dan tinggal ambil dengan waktu yang sudah ditentukan.

Dengan SDS ini layanan kebutuhan administrasi kependudukan lainnya seperti KK, akta kelahiran, dan surat kematian bisa tersedia dengan cepat. SDS bahkan dapat diintegrasikan dan mendukung layanan BPJS atau bantuan sosial lainnya. Sehingga cerita data penerima yang tidak sinkron tidak boleh lagi terdengar. SDS juga akan memudahkan ketika ke depan warga diharuskan migrasi ke IKD

Jadi untuk meningkatkan layanan prima kependudukan setidaknya diperlukan dua hal. Pertama, visi layanan prima harus terinternalisasi pada setiap aparat pemerintah dan dipastikan mereka mempraktikkannya. Perlu adanya pelatihan dan pembinaan yang memadai, termasuk pemberian sanksi jika dibutuhkan.

Kedua, tersedianya sarana, berupa alat rekam di setiap kecamatan, bila memungkinkan di setiap desa. Kebutuhan sarana lainnya adalah adanya perangkat lunak berupa SDS, dan koneksi yang baik agar SDS terintegrasi se-Kabupaten Cirebon.

Kesehatan Terjamin Pelayanan Paripurna

Sering kita mendengar celetukan: "Orang miskin tidak boleh sakit," atau "Gara-gara sakit jadi miskin." Seolah-olah, layanan kesehatan prima hanya untuk orang kaya. Padahal dengan keberadaan jaminan kesehatan semesta atau *universal health coverage* (UHC) orang miskin pun harusnya mendapatkan layanan prima.

Kabupaten Cirebon kini semakin mendekati angka 100% UHC. Pada Maret 2023 mencapai 96,07%, dan pada Desember 2023 sudah 99,45%. Harusnya Pada 2024 sudah mencapai 100%. Ini tidak bisa ditawar lagi: UHC 100%.

Ini artinya semua warga Kabupaten Cirebon sudah terdaftar mendapatkan jaminan kesehatan via BPJS. Dengan hanya bermodalkan KTP Kabupaten Cirebon harusnya sudah bisa mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan ketika terjadi risiko.

Namun demikian beberapa waktu yang lalu, yang notabene UHC sudah mendekati 100%, justru sebagian perangkat desa justru BPJS berstatus non-aktif. Lagi-lagi mental aparat belum sepenuhnya memberikan layanan prima.

Begitu pun dengan layanan yang didapati para peserta BPJS di rumah sakit. Mereka sering dianggap sebagai warga kelas dua. Tak pantas mendapatkan layanan prima. Pasien umum atau pemegang asuransi lain dilayani lebih manusiawi.

Padaحال dengan BPJS juga, layanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien bukan cuma-cuma. Sama dibayar, seperti halnya pasien umum atau pemegang asuransi lain. Jika ada persoalan layanan BPJS ke rumah sakit yang kurang baik, maka tugas BPJS untuk memperbaiki kinerjanya.

Untuk menjawab hal itu bisa juga dengan peningkatan layanan RSUD. Sebagai rumah sakit pemerintah, RSUD harus menjadi garda terdepan memberikan layanan prima demi mendukung UHC 100%. Tanpa layanan prima, UHC 100% menjadi kurang berarti. Bahkan sia-sia, ketika masyarakat justru tidak menggunakan fasilitas UHC.

Untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap RSUD bisa dilihat dari *turn of interval* (TOI, atau interval dari selesai dipakai ke pemakaian berikutnya) penggunaan tempat tidur di RS. Dari kapasitas 368 tempat tidur, TOI di RSUD Arjawinangun 4,2 hari dan RSUD Waled dengan jumlah tempat tidur 355, TOI-nya 5,9 hari (Profil Kesehatan, Dinkes Kab. Cirebon)

Bandingkan dengan RS Mitra Plumbon, dengan kapasitas 407 tempat tidur, TOI 1,1 hari; RS

Sumber Waras dengan kapasitas 179 tempat tidur, TOI 2,5 hari; dan RS Sumber Hurip dengan kapasitas 100 tempat tidur, TOI 1,6 hari.

Data tersebut menunjukkan bahwa tempat tidur kosong di RSUD rata-rata selama 4 sampai 6 hari, sedangkan di RS swasta hanya kosong dalam 1 sampai 2 hari. Data ini merupakan cerminan bahwa masyarakat lebih memilih RS swasta ketimbang RSUD.

Tentu saja kualitas pelayanan menjadi jawaban kenapa masyarakat lebih memilih RS swasta ketimbang RSUD. Untuk itu, kualitas pelayanan RSUD harus selalu ditingkatkan. Baik dengan melengkapi dan memperbaharui sarana alat kesehatan, maupun dengan peningkatan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan.

Selain RSUD, peningkatan kualitas layanan kesehatan juga harus dilakukan di tingkat Puskesmas, baik Puskesmas rawat jalan, inap, maupun Puskesmas dengan Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

Dari 60 Puskesmas, baru 11 Puskesmas rawat inap dan 35 Puskesmas PONED. Ke depan semuanya harus bisa menjadi Puskesmas rawat inap dan PONED, atau setidaknya ada satu Puskesmas rawat inap dan PONED di setiap kecamatan.

Kecepatan penanganan kesehatan masyarakat juga harus didukung dengan keberadaan Polindes (Pondok Bersalin Desa) dan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang berdiri di semua desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, jaminan kesehatan UHC 100% akan bermanfaat penuh dengan ketersediaan infrastruktur kesehatan dan layanan yang paripurna.

Sumber Bervisi Ibukota

Apa yang Anda bayangkan tentang Sumber masa depan? Relakah kita Sumber sebagai ibukota kabupaten, tumbuh tanpa perencanaan, penuh dengan kekumuhan, keserawutan, dan keruwetan masalah sosial? Sebelum itu terjadi, visi dan perencanaan Kota Sumber harus digagas secara serius.

Sejak 1999, sebenarnya pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum sudah mengkaji dan mencanangkan tentang visi kota di Indonesia masa depan. Setidaknya ada empat unsur yang harus ada pada visi dan perencanaan pembangunan sebuah kota.

Pertama, adanya sentuhan teknologi di berbagai sistem dan sub sistem pembangunan kota. Kedua, tumbuhnya kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga, pendekatan sistem dan penataan ruang kota berdasarkan pemecahan masalah secara multidimensi, multidisipliner, interdisipliner, dan intradisipliner, sehingga kompleksitas masalah dapat terselesaikan dengan baik. Keempat, keterpaduan orientasi, perencanaan, kemitraan, dan partisipasi seluruh *stakeholder* masyarakat.

Sumber resmi menjadi ibukota Kabupaten Cirebon berdasarkan PP Nomor 33/1979, dan ditempatkan sebagai ibukota pada 1988. Pertanyaannya apakah Kota Sumber dibangun dengan sebuah visi dan perencanaan yang matang? Setidaknya, setelah visi kota-kota di Indonesia dicanangkan pemerintah pusat, sudahkah Kota Sumber mengadopsinya?

Tentu saja kita tak perlu memperdebatkan hal itu sudah dilakukan atau belum. Tidak ada gunanya, hanya menghabiskan energi. Saat ini, yang terpenting adalah bagaimana merumuskannya untuk Kota Sumber ke depan. Sebelum Kota Sumber tumbuh dalam keliruan keruwetan, atau dalam kemandekan.

Kita harus merumuskannya mulai dari sesuatu yang abstrak berupa visi Kota Sumber ke depan. Jika diperlukan, visi ini dapat dibuat dalam dokumen resmi berupa Perda. Di dalamnya, sekaligus

memuat tentang rencana tata ruang Kota Sumber baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Selain perencanaan tata ruang yang mengacu pada keempat unsur di atas, Kota Sumber di tata dengan lanskap yang menjunjung tinggi nilai-nilai estetis. Kota harus asri, indah, dan nyaman, baik bagi penghuni dan para tamu.

Akses jalan menuju sumber juga harus ditingkatkan baik secara jumlah maupun kualitas jalan. Misalnya, jalan akses dari Jalan Tuparev via Kedawung harus ditingkatkan dan diperlebar, atau membuka jalan baru yang menghubungkan akses pintu tol Ciperna ke Sumber.

Perlu juga dibangun jalan lingkar menuju Kota Sumber. Sehingga warga Cirebon Timur dan Cirebon Utara dapat lebih mudah dan cepat menuju Sumber tanpa harus melalui Kota Cirebon terlebih dahulu.

Tentu saja pembangunan Kota Sumber juga harus terintegrasi dengan rencana pembangunan Kawasan Industri Cirebon Timur dan Kawasan Pariwisata Trusmi-Gunungjati. Salah satunya, dengan meningkatkan akses jalan menuju Sumber dari arah Weru.

Jika mengacu pada visi kota di Indonesia yang dicanangkan pemerintah pusat maka, Kecamatan Sumber termasuk kategori kota besar karena sudah berpenduduk lebih dari 100.000. Dengan demikian, pengembangan Kota Sumber juga harus diintegrasikan dengan rencana pengembangan transportasi publik.

Transportasi publik yang berbasis teknologi menjadi elemen penting dalam perencanaan kota besar. Bahkan, keberadaan transportasi publik masa depan menjadi sebuah keharusan. Ini menarik jika transportasi publik di Kabupaten Cirebon bisa terpadu dengan akses pintu tol, stasiun kereta, pelabuhan dan bandara.

Untuk itu semua, strategi lagi-lagi berperan penting, baik dalam pembuatan visi, perencanaan, dan tahapan pembangunan dan pengembangan. Strategi pengembangan Kawasan Ibukota Sumber harus selaras dengan rencana besar pembangunan Kabupaten Cirebon.

BUMD Motor Penggerak Ekonomi

Kemiskinan dan pengangguran jadi sorotan. Sudahkah pemerintah Kabupaten Cirebon menyelesaikan masalah ini dengan menciptakan lapangan kerja? Sudahkah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tumbuh dan menjawab permasalahan itu?

BUMD idealnya memiliki empat fungsi. Pertama, mampu menjadi pendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kedua, memaksimalkan potensi daerah, baik sumber daya alam, sejarah, maupun manusia. Ketiga, dapat berperan sebagai penyeimbang kekuatan pasar. Keempat, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyeteroran deviden sebagai laba BUMD.

Bagaimanakah dengan BUMD di Kabupaten Cirebon? Sudahkah empat fungsi itu berjalan? Untuk menjawab hal ini, perlu kita melihat kiprah BUMD yang ada di Kabupaten Cirebon.

Jika mengacu pada Perda, saat ini baru ada empat BUMD di Kabupaten Cirebon. Tiga BUMD sudah operasional, dan satu BUMD belum operasional sejak didirikan. BUMD yang sudah operasional, pertama adalah Perumda Air Minum Tirta Jati (PDAM Tirta Jati).

PDAM Tirta Jati ini juga sering jadi sorotan karena kondisi keuangan yang kerap diisukan atau diberitakan merugi. Per 31 Desember 2021 sesuai dengan laporan auditor independen sudah mengalami keuntungan mencapai Rp 916 juta, dan Rp 1,4 miliar pada 2022.

Jika mengacu pada Perda Nomor 11 tahun 2011 dan perubahannya Perda Nomor 3 tahun 2019, maka dari laba bersih itu alokasi untuk pemerintah daerah sebesar 55%. Artinya sumbangan ke Pendapat Asli Daerah (PAD) dari PDAM Tirta Jati hanya berkisar Rp 770 juta.

BUMD kedua adalah BPR Cirebon Jabar (BCJ). BCJ adalah *brand name* dari PT (Perseroda) BPR Astanajapura. BPR ini merupakan penggabungan tujuh BPR, yang sebelumnya berbasis di kecamatan-kecamatan, sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2018. Pada 2023 BPR ini membukukan laba sekitar Rp 7 miliar.

BUMD ketiga juga BPR, yang merupakan hasil

penggabungan 12 BPR, sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2018. BUMD ini berbadan hukum Perumda, yakni BPR Kabupaten Cirebon (BKC), yang merupakan *brand name* dari BPR Babakan. Pada 2021 berhasil mengantongi laba sekitar Rp 8,7 miliar.

BUMD yang keempat adalah Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa (PPJ). Sejak kelahirannya, pada 14 Desember 2007 (sesuai Perda Nomor 16 tahun 2007), hingga saat ini belum beroperasi sebagai entitas bisnis.

Selain empat BUMD tersebut Pemkab Cirebon juga menempatkan investasi (saham) di BJB, sesuai dengan amanat Perda Nomor 11/2016. Dalam laporan resmi Bank BJB tahun 2023, saham Pemkab Cirebon sebanyak 0,57%, atau 60,015,043 lembar saham, senilai Rp 15.003.760.750.

Dari deretan BUMD tersebut peran PDAM Tirta Jati juga belum maksimal memberikan layanan air bersih, terlebih kinerja keuangan masih belum stabil. Aset dan kinerja BKJ dan KCJ harus dipompa sehingga mampu mengelola arus uang APBD. Selama ini APBD disimpan dan dikelola melalui BJB.

Dari empat BUMD tersebut yang paling ironis adalah PPJ. Perusahaan didirikan melalui Perda, dibuat pengurus, lalu tidak beroperasi. Untuk itu keberadaan PPJ perlu dikaji ulang: apakah dilanjutkan dengan banyak penyesuaian, atau dihentikan.

Tampaknya dengan kondisi perlunya percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Cirebon keberadaan PPJ sangat diperlukan terutama untuk menopang rencana pembangunan kawasan industri, pariwisata, dan ibukota.

Selain operasionalisasi PPJ perlu juga dibuat BUMD pasar. Beberapa waktu lalu pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mengutarakan pendirian BUMD ini, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang signifikan.

Keberadaan BUMD, baik yang sudah operasional, belum operasional, maupun yang akan berdiri, sangat penting untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu upaya untuk pembenahan dan pemberdayaan segala potensi ekonomi via BUMD harus serius dijalankan.

Olahraga Beprestasi dan Sejahtera

Sarana terbatas, GOR terbengkalai, kisruh pengurus, minim prestasi, walaupun ada prestasi saling klaim paling berjasa, kesejahteraan atlet, hingga atlet berprestasi dibajak daerah lain; itulah deretan keluhan tentang olahraga yang kerap bersandar di DPRD. Apakah DPRD diam?

Tentu tidak, sudah menjalankan tugas sesuai fungsinya. Tapi kenapa masalahnya masih itu-itu aja? Ya, tentu saja, *wong* acap kali kami mendapati apa yang dikerjakan pemerintah tidak menjawab persoalan. Bahkan, substansi masalahnya saja kurang dipahami.

Sebenarnya masalah olahraga di Kabupaten Cirebon bukan hanya tentang Olahraga Prestasi (Opres). Tampaknya juga bermasalah pada Olahraga Pendidikan (Open) dan Olahraga Masyarakat (Omas). Di Olahraga Pendidikan perlu penguatan bahwa Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) bukanlah sekadar pelajaran pelengkap.

Kebanyakan siswa beranggapan bahwa PJOK tidak berperan pada prestasi dan kelulusan, karena bukan mata pelajaran ujian sekolah. Padahal dengan olahraga dan jasmani yang sehat akan lahir pribadi-pribadi dengan jiwa dan pikiran yang sehat. Artinya dalam PJOK perlu ditekankan peran strategis olahraga dalam pencapaian akademik.

Sedangkan Omas kebanyakan berjalan secara mandiri. Baik dilakukan oleh pribadi maupun organisasi masyarakat. Selain itu, sering kali mendapatkan kendala mengenai sarana dan fasilitas olahraga yang kurang memadai. Di sinilah pentingnya peran pemerintah untuk mendukung Omas.

Namun demikian, kita patut mengapresiasi masyarakat yang terus menggelar turnamen atau pertandingan Omas, terutama dari sisi mengolahragakan dan menghibur masyarakat. Jika Omas juga mendapatkan perhatian pemerintah, seharusnya juga menjadi ujung tombak pencarian bibit unggul atlet Opres.

Di sisi lain, pembinaan Opres yang diharapkan mampu mendongkrak prestasi juga selalu dirundung ironi yang tak berkesudahan. Kisruh pengurus komite olahraga masih melanda, persiapan berbagai turnamen dan pekan olahraga tak maksimal.

Ketika pengurus komite olahraga sibuk dengan kepentingan pribadi dan golongannya maka sulit

prestasi olahraga sebuah daerah terwujud. Terlebih konflik itu berakar pada rebutan kue anggaran.

Ini jelas merupakan indikator bahwa mereka bukanlah insan olahraga. Insan olahraga adalah manusia yang sehat mental, jasmani, dan jiwanya. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjunjung tinggi sportivitas dan *fair play*, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan.

Bagaimana jadinya ketika olahraga justru diurus oleh orang-orang yang tidak bermental olahraga (sportif)? Tentu minim prestasi bukan? Walaupun ada prestasi biasanya saling mengklaim dirinya-lah yang paling berperan atas prestasi tersebut.

Berprestasi ribut, tidak berprestasi juga ribut. Bahkan, pasca berprestasi juga ribut, ketika sang atlet dibajak daerah lain. Karena faktor kesejahteraan dan rendahnya perhatian pengurus dan pemerintah, sang atlet berprestasi pun memilih pindah ke daerah lain yang lebih menjanjikan. Pada titik ini kemudian pengurus dan pemerintah kembali ribut, saling menyalahkan.

Dari deretan masalah tadi maka sebenarnya masalah olahraga adalah bukan pada keberadaan bibit unggul dan talenta-talenta yang andal, pada mental pengurus dan pemerintah. Peran pemimpin daerah harus mampu mengendalikan mental dan kinerja jajarannya.

Perlu adanya sentuhan pemerintah dalam Open dan Omas agar menjadi *support system* bagi Opres. Sedangkan bagi Opres sendiri, perlu adanya pembenahan mental pengurus, manajemen, dan penerapan *sport science*.

Di sisi lain, demi tersedianya sarana yang memadai, pemerintah harus pro aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat agar sarana yang mangkrak segera selesai. Dana dari provinsi dan pusat tersedia, namun karena lemahnya komunikasi dan lobi dari Pemkab, anggaran itu tak mengalir ke Kabupaten Cirebon.

Jika pengurus komite tidak berkonflik, pemerintah aktif, sarana tersedia, *sport science* diterapkan, ke depan olahraga di Cirebon akan berubah menjadi Olahraga Industri. Olahraga juga akan mendukung tumbuhnya ekonomi dan pariwisata, dengan digelarnya berbagai *event* nasional dan internasional.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Terima Kasih Kepada Anggota DPRD Kab. Cirebon



Periode: 2019-2024



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Selamat Bertugas

Kepada Anggota DPRD Kab. Cirebon

Periode: 2024-2029

